



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL, DIRUT PERUM BULOG, DAN
DIRUT PT.RNI (PERSERO)/HOLDING PANGAN**

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke-	:	3
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 13 Maret 2024
Waktu	:	Pukul 14.30 s.d. 17.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Ketua Rapat	:	Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) dilanjutkan oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara	:	- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. - Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024; dan - Isu-isu aktual lainnya
Sekretaris Rapat	:	Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B., (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	:	A. Anggota DPR RI: 35 dari 53 orang Anggota dengan rincian:

**1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan**

8 dari 11 orang Anggota

- 1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
- 2) Ono Surono, S.T.
- 3) Drs. I Made Urip, M.Si.
- 4) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
- 5) Vita Ervina, S.E., M.B.A.
- 6) Maria Lestari, S.Pd.
- 7) M.R. Ihsan Yunus, BA, B.Comm., ME.Con
- 8) Novri Ompusunggu, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya

7 dari 8 orang Anggota

- 1) Ir. Budhy Setiawan, M.Si/Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI.
- 2) H.M. Salim Fakhry, SE., M.M.
- 3) Firman Soebagyo, S.E., M.H.
- 4) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
- 5) Ir. Panggah Susanto, M.M.
- 6) Alien Mus, S.H.
- 7) Teti Rohatingsih, S.Sos

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

6 dari 7 orang Anggota

- 1) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro,
M.M.
- 2) Ir. H. T.A. Khalid, M.M.
- 3) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
- 4) Dr. Endang Setyawati Thohari,
DESS., M.Sc.
- 5) Ir. Dwita Ria Gunadi
- 6) Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat

3 dari 6 orang Anggota

- 1) H. Sulaeman L. Hamzah
- 2) Ir. Abdullah Tuasikal
- 3) Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

2 dari 5 orang Anggota

- 1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI.
- 2) Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat

3 dari 5 orang Anggota

- 1) Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
- 2) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
- 3) Bambang Purwanto, S.St., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

4 dari 5 orang Anggota

- 1) Drh. H. Slamet
- 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP.,
M.M.
- 3) Dr. Hermanto, S.E., M.M.
- 4) Saadiah Uluputty, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

2 dari 4 orang Anggota

- 1) Haerudin, S.Ag., M.H.
- 2) Ir. Alimin Abdullah

10. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

0 hadir dari 2 orang Anggota

-

B. Pimpinan/Anggota Izin

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
2. Fraksi Partai Demokrat
1) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1) Ema Umiyyatul Chusna

C. Pemerintah

1. H. Arief Prasetyo Adi, ST., M.T. (Kepala Badan Pangan Nasional);
2. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Plt. Sekretaris Utama);
3. Dr. I Gusti Ketut Ketut Astawa, S.Sos., M.M. (Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan);
4. Dr. Nyoto Suwignyo, M.M. (Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi);
5. Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P. (Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan);
6. Bayu Krisnamurthi (Direktur Utama Perum BULOG) beserta jajaran; dan
7. Frans Marganda Tambunan (Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD) beserta Anak Perusahaan.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (F-PKB/ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Bismillahirrahmanirrahim,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Kepala Badan Pangan Nasional beserta semua jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog yang baru...**

Selamat datang di hutan belantara Komisi IV dan semua jajarannya...,
beserta jajarannya,

**Yang terhormat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia
Persero/Holding Pangan ID Food beserta anak Perusahaan, dan
Bapak-Ibu Hadirin yang saya hormati,**

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat
dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dengan
keadaan sehat wal'afiat.

Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak, Ibu yang
sedang menjalankan ibadah puasa. Yang belum..., yang mau buka puasa siang
ini juga nggak apa-apa, kita sudah siapkan bagi yang mau buka puasa. Pak
Maryadi kayaknya mau buka puasa....

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan IV Tahun
Sidang 2023-2024 yang telah diputuskan Rapat Paripurna DPR tanggal 6
Maret 2024 dan Keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 6 Maret
2024, pada hari ini Rabu, 13 Maret 2024, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan
RDP dengan Kepala Badan Pangan Nasional, menghadirkan Direktur Utama
Perum Bulog dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam
rangka membahas: Yang pertama, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2023;
Yang kedua, Rencana Program dan Kegiatan tahun 2024; dan Isu-isu aktual
lainnya. Nah, ini yang paling banyak ini isu-isu aktual lainnya terutama tentang
beras dan yang lain-lain terkait dengan pangan.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang
Tata Tertib, RDP ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju?

**(RAPAT SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

RDP siang ini dimulai pada pukul 14.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 17.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Kepala Badan Pangan Nasional;
5. Kesimpulan Rapat; dan
6. Penutup.

Apakah rapat bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Pada Rapat Dengar Pendapat tanggal 13 September 2023, tahun lalu, Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 sebesar 442,631 miliar. Untuk itu, pada hari ini Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional untuk memberikan penjelasan secara mendetail mengenai rencana kerja dan program untuk Tahun Anggaran 2024.

Beberapa waktu yang lalu, Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan ke pasar tradisional di beberapa daerah. Hasilnya adalah terdapat kenaikan beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, telur, daging, ayam, hingga bawang putih. Meskipun, ini memang sangat lazim karena di tengah menjelang Ramadhan sama lebaran biasanya memang naik. Hal ini harus mendapatkan perhatian khususnya dari pemerintah mengingat kita sedang berada dalam bulan Ramadhan dan menjelang hari keagamaan nasional, dimana tren setiap tahunnya akan mengalami peningkatan permintaan pangan dan berdampak kepada kenaikan harga pangan.

Kalau beras sebelum Ramadhan pun naiknya sudah enggak karu-karuan, bahkan tahun lalu sudah naik ya Pak? Jadi, ini tentu..., tadi mungkin Pak Dirut di Komisi VI juga ngomongin tentang beras ini.

Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan langkah strategis dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam rangka..., dalam kerangka pikir kita semua seharusnya tidak terjadi kenaikan komoditas pangan secara drastis karena sesuai dengan laporan Kementerian Pertanian dalam rapat kerja pagi ini tadi produksi komoditas pangan kita melebihi target produksi seperti beras, bawang merah, aneka cabai.

Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung pada pemerintah, kepada Presiden, wajib memiliki perencanaan yang matang terkait dengan kebutuhan dan data pangan secara lengkap, baik dari sisi produktivitas, produksi, harga, atau bahkan

cadangan negara yang digunakan untuk menghadapi bencana atau fluktuasi pasokan maupun harga pangan.

Perum Bulog, ID Food, sebagai perpanjangan tangan Bapanas juga diharapkan pro aktif dalam mendukung stabilitas pangan dan cadangan nasional. Komisi IV DPR RI berharap agar penugasan Perum Bulog dan ID Food dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan pangan strategis lebih ditingkatkan lagi. Terlebih, Perpres Nomor 125 Tahun 2022 telah mengamanatkan Bapanas untuk dapat menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah dengan penugasan BUMN Pangan untuk menyediakan pangan, khususnya beras, jagung, dan kedelai.

Kalau kita lihat namanya beras ini menjadi isu nasional, menjadi isu nasional. Belum lagi kita bicara tentang jagung, kalau jagung sekarang sudah turun ya Pak ya? Sudah turun di saat sebenarnya sudah ada sekarang impor, kalau tidak salah sudah ada impor, tapi sudah turun.

Nah, ini perlu kita cermati dan tentu ini menjadi perhatian khusus. Seperti yang tadi saya sampaikan ketika rapat dengan Kementerian Pertanian, bahwa pangan ini adalah masalah *immediate* yang nggak bisa ditunda. Kalau misalnya mau jalan-jalan bisa ditunda, kalau misalnya mau pakai baju bagus bisa ditunda, kalau makan itu nggak bisa ditunda. Harusnya, punya perhatian yang lebih, negara punya perhatian yang lebih yang bisa mengesampingkan agenda-agenda yang misalnya masih sekunder gitu. Agenda pangan ini adalah agenda yang sangat *urgent*.

Saya persilakan Pak Arief untuk bisa memaparkan paparannya siang ini. Silakan.

Selamat datang Mas Ketua Budhy, selamat berpuasa maksudnya. *Oh* iya, selamat ini lagi bulan madu, *oh* ya baru pertama kali ketemu ini setelah bulan madunya berbulan-bulan.

Silakan Pak Arief, mohon maaf.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.

**Yang kami hormati segenap Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Direktur Utama Perum Bulog beserta jajaran,
Direktur Utama ID Food beserta jajaran, serta
Bapak-Ibu Hadirin yang berbahagia.**

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan rapat dengar pendapat hari ini, dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum muslimin, dan semoga di bulan suci ini kita semua mendapatkan berkah dan ridha *Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aamiin*.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan tiga topik sesuai dengan agenda rapat. Yang pertama, evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan anggaran tahun 2023. Selanjutnya, rencana program dan kegiatan tahun 2024. Yang ketiga, kondisi aktual pangan nasional.

Untuk agenda pertama, dapat kami sampaikan bahwa realisasi anggaran dan kegiatan capaian selama tahun 2023, khusus realisasi anggaran sebesar 445.154.689.537 atau setara 95,78% dari Pagu 464,7 triliun..., miliar. Dengan detail-detail masing-masing berdasarkan kegiatan satuan kerja dan jenis belanja terdapat di halaman empat.

Selanjutnya, realisasi program tahun 2023 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

- a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2023 terealisasi 94,1 dari 94%;
- b. Nilai *Food Insecurity Experience Scale* 4,5 dari 4,2;
- c. Inflasi pangan bergejolak 6,7% dari target $4\% \pm 1$;
- d. Nilai reformasi birokrasi 80,02 dari target 78; sedangkan
- e. Nilai CFFSI dan opini BPK masih belum tersedia.

Capaian ketahanan pangan Indonesia tahun 2023 dapat di lihat dari peningkatan skor Pola Pangan Harapan menjadi 94,1. Penurunan POU atau *prevalence of undernourishment* menjadi 8,53% dan penurunan jumlah wilayah rentan rawan pangan menjadi 68 kabupaten kota dari sebelumnya 74.

Selama tahun 2023, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk pencapaian ketahanan pangan di antaranya adalah fasilitasi distribusi pangan, gerakan pangan murah, fasilitasi sarpras rantai dingin, intervensi kerawanan pangan, *food donation*, desa B2SA (Beragam Bergisi Seimbang dan Aman), fasilitasi mobil lab keamanan pangan, B2SA *Goes to School*, dan Genius. Selain itu, di tahun 2023 kami juga telah melaksanakan program penyaluran bantuan pangan beras selama tujuh bulan melalui Perum Bulog dan bantuan pangan untuk *stunting* selama enam bulan melalui ID Food.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI beserta hadirin yang berbahagia,

Agenda ke dua, mengenai Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024 dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kami menuangkan rencana kegiatan Badan Pangan Nasional tahun 2024 ke dalam empat kegiatan dalam dua program kerja, yakni Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Dukungan Manajemen dan teknis lainnya dalam Program Dukungan Manajemen.

Sesuai dengan Pagu Alokasi Tahun 2024, Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi anggaran sebesar 442,6 milyar. Selanjutnya, untuk pembayaran bantuan pangan, penanganan *stunting* tahap I tahun 2023 serta pembayaran bantuan pangan beras dan penangananan *stunting* tahap I tahun 2024, Badan Pangan Nasional mendapat Anggaran Belanja Tambahan senilai 6,38 Triliun. Sehingga, total di alokasi tahun 2024 menjadi 6,82 triliun. ABT I dan II merupakan pengalihan anggaran dari BA-BUN ke BA125. Jadi, kalau tadi karantina belum, Badan Pangan Nasional sudah punya BA sendiri, Ketua, sesuai dengan amanat Perpres 125 Tahun 2022.

Berdasarkan pagu tersebut, disusun rancangan program dan anggaran sebagai berikut:

1. Program Ketersediaan dan Akses Konsumsi Pangan Berkualitas senilai 6,71 triliun yang terdiri dari kegiatan-kegiatan:
 - Pemantapan dan Ketersediaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, ini ada di Deputi I sebesar 6,52 triliun. Kemudian,
 - Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Deputi II sebesar 86,83 miliar. Yang ketiga,
 - Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan ini ada di Deputi III sebesar 101,87 miliar.

Berikutnya,

2. Program Dukungan Manajemen dan Sekretariat Utama sebesar 114,86 miliar yang terdiri dari.
 - Gaji dan Operasional Perkantoran, ini belanja mengikat sebesar 63,87 miliar. Dan
 - Dukungan Manajemen Teknis Lainnya sebesar 50,98 miliar.

Agenda berikutnya, terkait kondisi aktual pangan nasional. Berdasarkan prognosa neraca pangan periode Januari dan Desember, ini tadi yang mungkin Ketua atau Pak Sudin menyampaikan stok awal beras 2024 sebesar 7 juta ton. Ini kami izin masih melakukan survei bersama lembaga independen sehingga nanti akan ada koreksi, mohon waktu mungkin sekitar dua minggu lagi akan kita *update* di rapat berikutnya, Ibu Pimpinan.

Kemudian, *update* per 7 Maret 2024 secara umum ketersediaan 12 komoditas pangan strategis diproyeksikan aman dan cukup. Sebagai catatan, untuk stok beras dan jagung sekali lagi, akan diperbaharui berdasarkan hasil survei stok tahun 2023 yang sekarang sedang berjalan.

Sejak tahun 2022, kami bersama BPS telah melaksanakan survei stok akhir tahun yang bertujuan untuk memvalidasi stok beras yang riil ada di masyarakat. Untuk *update* neraca beras dan jagung tahun 2024 pekan ketiga ini *Insyallah* akan dirilis. Secara umum, harga pangan nasional cukup stabil dan memang diakui ada beberapa kenaikan di beberapa komoditas khususnya beras.

Challenge saat ini adalah harga GKP dan harga jagung di tingkat produsen yang terus menurun. Jadi, kalau beberapa waktu lalu ya, *challenge*-nya adalah harga GKP di atas 3.000 ya baik jagung maupun GKP. Kalau kali ini, malah *challenge* kita adalah menjaga harga di tingkat petani.

Menurut KSH BPS amatan Januari 2024, produksi beras bulan Maret diperkirakan 3,5 juta ton dan April sebesar 4,92 juta ton.

Berdasarkan arahan tersebut, neraca produksi vs konsumsi Januari sampai dengan April kita baru akan surplus di April ya 530.000 ton. Tapi, ini masih lebih rendah 2,28 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Jadi, tahun 2023 produksi menurun, tahun ini lebih menurun lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi memang kita harus bersiap. Apabila bulan Maret ini kita tidak bisa menanam lebih dari 1 juta hektar, maka di bulan delapan kita harus sudah bersiap-siap untuk cadangan pangan pemerintah.

Inflasi Indonesia pada bulan Februari berada di angka 2,75% *year on year*. Berdasarkan komponennya, inflasi bergejolak berada di angka 8,47% *year on year* dan beras menjadi salah satu komoditas penyumbang utama andil inflasi sebesar 0,67%. Intervensi pemerintah berupa bantuan pangan beras efektif menahan laju inflasi beras seperti terlihat dalam grafik sebelah kanan atas. Untuk periode penyaluran April-Juni, September-Desember, dan Januari-Februari 2024.

NTP Nilai Tukar Petani untuk Tanaman Pangan bulan Februari 2024 sebesar 120,3 atau lebih tinggi 3,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan ketersediaan beras dengan nilai tukar petani, khususnya tanaman pangan.

Badan Pangan Nasional bersama Bulog dan BUMN Pangan ID Food terus berprogres dalam penguatan cadangan pemerintah. *Stock level* masing-masing komoditas ditargetkan 5 sampai 10% dari kebutuhan atau *market share* nasional untuk intervensi pasar. *Alhamdulillah* pada saat ini Perum Bulog mengelola lebih dari 5% komoditas beras, jagung, dan kedelai. Secara bertahap cadangan pangan ini mulai kita tingkatkan satu per satu. Kami telah menerbitkan juga keputusan Kepala Badan Pangan yang mengatur jumlah minimal stok yang dikelola dan stok akhir tahun 2024. Jumlahnya belum sebanyak yang kita inginkan, tetapi kita sudah mulai *put* mana yang menjadi tugas Bulog, mana yang menjadi tugas ID Food beserta anak-anak perusahaan. Sebagai informasi, saat ini Perum Bulog memiliki *secure stock* sebanyak 1,12 juta ton dengan realisasi penyaluran beras nasional tahun 2024 hingga minggu pertama bulan Maret sebanyak 834.971 ton.

Bapak-Ibu Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Dalam rangka menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2024, kami melakukan enam aksi strategis, antara lain: penyaluran beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, gerakan pangan murah GPM se-Indonesia, fasilitasi distribusi pangan,

penyaluran jagung SPHP kepada peternak, penyaluran bantuan pangan, serta koordinasi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, para *stakeholder* pangan dari hulu ke hilir.

Berikut adalah detail enam aksi kegiatan tersebut.

- Realisasi penyaluran beras SPHP sampai dengan 8 Maret 2024 sebesar 424.157 tibu ton. Penyaluran terbesar di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
- Realisasi GPM (Gerakan Pangan Murah) bulan Januari-Maret sebanyak 1.958 kali.
- Realisasi bantuan pangan beras bulan Januari sebesar 97,25%, bulan Februari 80,31%, dan bulan Maret berjalan 4,07% menggunakan data dari KemenkoPMK.
- Realisasi penyaluran SPHP jagung kepada peternak mandiri sebanyak 207.587 ton dan ini menyikapi harga jagung yang sangat tinggi beberapa bulan terakhir.
Tentunya, saat ini kita stop importasi karena fokus kita semua adalah penyerapan panen lokal.
- Rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, gubernur, walikota se-Indonesia, beserta stakeholder pangan.

Kami memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang telah bersama-sama mencek langsung kondisi pangan menjelang Ramadhan di Lampung, Jawa Barat, Banten, dan DIY.

Bapak-Ibu Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV,

Izin, kami laporkan pekan lalu kami menerbitkan Surat Relaksasi HET Beras Premium untuk periode tanggal 10 Maret sampai dengan 23 Maret 2024. Kami harap dengan diberlakukannya relaksasi ini dapat mendorong ketersediaan dan pasokan beras premium di tingkat konsumen. Setelah tanggal 23 Maret, kami izin untuk mengembalikan lagi sesuai dengan HET pada Perbadan Nomor 7 Tahun 2023. Dan tadi atas saran Ketua Komisi IV, kita sebenarnya setelah ini harus duduk kembali untuk mereviu agro input sehingga didapatkan HPP yang ideal. Walaupun kami sangat sadar bahwa apapun yang diputuskan selalu tidak bisa 100% menyenangkan petani saudara kita atau pedagang bahkan konsumen. Tetapi, kita akan menjadi sangat obyektif apabila kita *review* dalam waktu dekat pada saat sudah normal.

Sebagai penutup, kami mengajak segenap Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dan seluruh masyarakat untuk menerapkan konsumsi pangan B2SA. B2SA ini beragam, bergizi seimbang, dan aman. Pola makan B2SA berisikan 1/3 makanan mengandung karbohidrat, 1/3 sayuran, 1/6 lauk pauk, dan 1/6 buah-buahan. Selain itu, kami menghimbau masyarakat untuk senantiasa menerapkan *stop boros pangan beserta belanja bijak*. Hal tersebut dapat mengurangi *food lose and waste*, stabilisasi harga pangan, dan menumbuhkan toleransi kepada masyarakat yang lebih memerlukan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan tentunya kami sangat terbuka terhadap masukan, koreksi, dan arahan yang membangun dari Bapak-Ibu Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV.

Sekian, terima kasih.

*Shalom,
Om Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Memang cari formulasi untuk harga yang ramah terhadap konsumen juga menjanjikan terhadap petani, lalu kemudian pedagang juga aman ramah itu memang susah. Tetapi, harus kita tempuh, harus kita cari. Tentu, ada karena negara kan diberikan wewenang instrumen yang lengkap untuk bisa mencarikan jalan supaya masyarakat warganya juga terjawab beberapa masalah yang terutama dalam pangan itu.

Selanjutnya, silakan para Anggota, Pak Budhy, *monggo*.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Menghindari juru bicara Fraksi dulu, pertama Bu Alien Mus, silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat sore.

Ini sudah tidak harus lagi panjang lebar.

Yang saya hormati semua Bapak-Ibu yang ada di depan kami ini,

Karena..., saya langsung saja Pak, tentunya kita pasti mau mengkonektiviskan kembali yang tadi sudah dirapatkan bersama dengan Kementerian Pertanian, kemudian dilanjutkan dengan Bulog dan juga Bapanas.

Pak Arief, saya langsung saja karena memang tadi sudah dijelaskan bahwa yang penyumbang inflasi terbesar salah satunya adalah beras. Karena itu, kita harus mencari solusinya. Sebenarnya kita kan sudah melihat bahwa hulu dan hilirnya pupuk dan sebagainya itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Tapi Pak..., Pak Arief, saya ingin menanyakan bahwa

distribusi SPHP yang sekarang sudah terjadi di tahun 2023 terus lanjut ke 2024 ini bagaimana sih pengawasannya? Terus, berapa persen yang sudah terserap dari 2023-2024? Kemudian, saya juga ingin menanyakan apakah bahwa dengan harga gabah kering giling ya, seperti yang disampaikan Pak Hanan tadi naik itu juga sangat membantu ke para petani yang tadinya kita melihat bahwa NT, seharusnya nilai tukar petaninya tinggi ya Pak ya, iya kan? Ini naik tapi ini saya lihat memang naik, kalau memang masih 100,97 itu saya pikir masih rendah, eh 120, 120. Maksud saya, kita juga harus melihat bagaimana dengan NTP nya.

Yang menjadi pertanyaan saya adalah kita sudah masuk tahun ke tahun masalah impor beras ini, harus diperjelaskan Pak Arief. Karena begini Pak, selalu menjadi salah satu apa namanya, *kok* kita rajin impor begitu, harus kita jelaskan juga bahwa hasil produksi kita sekian Pak, harus kita sampaikan bahwa ini jangan sampai ada tumpang tindih. Kemudian, yang sekarang menjadi permasalahan beras, tapi di hari-hari besar itu bukan hanya beras saja yang menjadi salah satu pemicu. Salah satunya tadi juga termasuk cabai, daging, terus juga apa namanya, tapi kalau itu nggak termasuk. Tapi, kalau hari besar ini minyak goreng jangan lupa loh, kalau kemarin tahun 2023 kelangkaan, heboh juga. Terus juga, cabai, terus daging. Nah daging juga termasuk salah satu apa namanya 9 bahan pokok, eh 12 bahan pokok sekarang yang diimpor. Nah, ini juga harus menjadi salah satu atensi kita, pengawasan kita. Terus juga, SPHP ini untuk penyerapannya tadi sudah saya sampaikan.

Kemudian, Pak Arief, saya sangat apresiasi ini Pak Arief punya dokumen ini menjadi atensi juga buat saya. Tadi saya belum baca yang ini untuk menyandingkan dengan pertanian. Tapi, setelah saya lihat bahwa kita sudah mulai masuk dalam satu *one map policy* lah, datanya sudah mulai agak-agak mirip dan sudah mulai sama, ini juga sangat baik. Kemudian, apa, yang tadi makan enak, makan sehat, makan B2SA yang dihabiskan ini salah satu program yang saya rasa ini ke depan juga akan *connect* dengan pemerintah ke depannya. Apakah ini termasuk salah satu yang akan masuk ke anak-anak? Karena ini *stunting* kan? Batas usianya sampai berapa? Misalnya, ini akan masuk ke SD, SMP, atau SMA? Misalkan seperti itu Pak.

Terus, untuk selanjutnya saya pikir itu dulu Pak..., Ibu Pimpinan karena beras menjadi salah satu atensi dan stok beras kita 2024 karena bulan tiga, bulan empat, itu sudah masuk musim panen ya panen raya ya. Apakah SPHP ini juga masuk untuk mau menyederhanakan masalah beras, harga beras, atukah itu mau bagaimana caranya untuk men-*combine* Bulog juga, Bapanas juga. Terus Pak, yang saya dapat di lapangan kemarin daerah saya juga, mungkin Ibu dari Bulog juga sering saya telpon bahwa kelangkaan beras ternyata juga ternyata walaupun SPHP juga terlambat. Karena ini kita sudah mau masuk hari besar begitu, jadi ini yang menjadi masalah.

Terima kasih Ketua.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Lanjut, ke jubir Fraksi Gerindra, Ibu Dwita Ria, silakan.

F-GERINDRA (Ir. DWITA RIA GUNADI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, beserta Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT RNI atau ID Food beserta anak perusahaan.

Pertama-tama, saya mewakili Fraksi Gerindra untuk menyampaikan ringkasan, tanggapan, pertanyaan sebagai berikut. Pertama Pak, mungkin kita harus evaluasi kondisi pangan kita ya. Di depan mata kita ini kemarin ada antre-antre beras dan ini sangat miris dan ironis apalagi kita adalah negara agraris. Apalagi saya ini juga mewakili Komisi Pertanian melihatnya ini tentunya rasanya nggak tega begitu ya, dengan membawa anak kecil mereka antre beras cuman dapat 10 kg. Tentunya, ini menjadi potretnya wajah Indonesia, mungkin nggak semua daerah antre. Tapi, satu kali potret itu berdampak buruk bagi dilihat oleh negara luar Pak. Nah, jadi mungkin ini harus kita evaluasi bagaimana teknisnya mudah-mudahan tidak terjadi lagi antre-antre beras seperti ini.

Kemudian, kami menyarankan agar Bapenas..., Bapanas bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan Menpan RB agar PNS atau pegawai BUMN itu juga mendapat beras premium Bulog. Sehingga, Perum Bulog itu mendapat kepastian pasar dan tentu juga petani menjual gabah ke Perum Bulog dengan harga yang lumayan tinggi.

Sekaligus Pak, perlu dievaluasi apakah HPP gabah 5.000 ini juga masih relevan mengingat harga biaya produksi yang makin tinggi. Di satu pihak, kami mendukung usulan apresiasi petani itu mengharapkan harga gabah itu di atas 7.000. Tapi, di sisi lain mereka juga masyarakat minta harga beras itu 10.000. Nah, ini tentu saja kata Bu Anggi tadi kita perlu cari formulasinya yang aman dan ramah bagi semuanya baik petani, masyarakat, maupun produsen.

Yang selanjutnya Pak, dalam kunker DPR RI ke Jawa Tengah itu Bapanas merekomendasikan agar Perum Bulog memiliki kemitraan dengan petani di sejumlah wilayah di sentra padi nasional minimal 500.000 hektar guna memenuhi cadangan beras pemerintah dalam satu tahun. *Nah*, kami juga mengharapkan ini bisa dilakukan kerja sama di wilayah-wilayah lain yang potensial. Terutama juga untuk petani yang sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian.

Kemudian, Badan Pangan Nasional bersama Menteri PPN/Bappenas mewakili Indonesia menyampaikan strategi transformasi sistem pangan mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* dalam pertemuan di *United Food System Summit* di Roma,

Italia. Nah, kami Fraksi Gerindra meminta penjelasan bagaimana komitmen dan langkah konkret yang akan dilakukan di tingkat nasional dan daerah? Mohon dapat dipaparkan program sistem pangan yang dimaksud seperti apa? Anggarannya? Kemudian, dampaknya terhadap pangan nasional? Kemudian target dan *output* perubahan sistem pangan untuk mengakhiri kelaparan dan kerawanan pangan serta kekurangan gizi di Indonesia.

Mungkin itu saja dari mewakili Fraksi Gerindra. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Selanjutnya, dari Fraksi Nasdem, Pak Sulaeman Hamzah.

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan segenap Anggota yang saya hormati,
Kepala Badan Pangan dan seluruh jajaran,
Para mitra sekalian yang saya hormati.**

Pertama, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi hari ini. Sebagaimana kita tahu persoalan pangan ini memang tidak bisa kita sembunyikan karena di mana-mana terjadi kelangkaan. Di Jakarta saja sekarang sudah antre, bahkan dijatah 5 kg satu orang yang belanja. Ini pemandangan seperti kita lihat beberapa tahun lalu, pernah kejadian tapi tidak separah ini. Nah, ini minta perhatian dari Pak Kepala Badan cara apa yang mesti dilakukan sehingga ini bisa memulihkan keadaan dalam waktu yang pendek ini? Kalau kita boleh sebut ini keadaan darurat yang memang mesti ditangani di mana-mana.

Selain itu, kita juga tahu bahwa ada bencana lain, ada gunung meletus, ada juga kejadian yang luar biasa yang memang perlu penanganan cepat. Apakah ini kita punya stok untuk bisa menanggulangi persoalan semacam ini? Ini soal-soal jangka pendek yang mesti kita timbang, kita pikirkan bersama, supaya krisis yang dialami daerah-daerah tertentu ini bisa kita atasi sebaik mungkin.

Selanjutnya, untuk kebijakan nasional untuk bagaimana persoalan kita pangan ke depannya, ini dalam waktu beberapa bulan ke depan sambil menunggu kebijakan selanjutnya untuk kita tanam dan panen. Tapi, mengatasi ini kan perlu ada data yang betul-betul akurat sampai ke daerah, bukan cuma di Ibu Kota saja tetapi sampai ke daerah. Karena bagaimana pun juga kebutuhan ini tidak hanya untuk orang di kota besar, tetapi juga untuk orang di daerah-daerah terpencil. Ini juga perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, ada bansos yang disebarkan kemana-mana. Ini juga saya kira tidak pas pada sasarannya, tapi itu sudah terjadi. Nah, perhatian itu apakah juga diberikan

kepada para masyarakat yang tertimpa bencana dan mengalami hal yang spesifik semacam itu apakah juga mendapat perhatian semacam itu?

Selanjutnya, untuk apa namanya, kerja-kerja besar kita untuk Badan Pangan ini, koordinasi sangat penting untuk bisa mengambil kebijakan yang betul-betul berpihak kepada petani. Kita mau impor ini kan insidental sebetulnya, tapi kan ke depan mesti kita buat sebuah desain besar bersama-sama dengan kementerian dan lembaga untuk bisa mengatasi kesulitan kita ini, jangan sampai berkelanjutan. Khawatir sekali kalau nanti persoalan ini tidak bisa diatasi, dibuat perencanaan terpadu secepatnya, ini menjadi bencana besar buat bangsa kita ini.

Saya kira ini saja beberapa hal yang saya sampaikan secara global. Pada intinya, angka-angka yang disebutkan di dalam rencana ini prinsipnya kita mendukung sepanjang itu tidak merugikan petani. Tapi, juga kebutuhan seluruh rakyat bangsa ini bisa terpenuhi semuanya.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Selanjutnya, Pak Suhardi Duka dari Fraksi Demokrat.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Makasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dari seluruh kajian kita, bahwa 2024 masih akan mengalami defisit terhadap produksi pangan kita. Sampai saat ini, Bulog memiliki 1,1 juta ton ya? Sesungguhnya tidak cukup untuk cadangan nasional. Perlu Badan Pangan memikirkan apakah nanti produksi dalam negeri ini sepenuhnya akan kita kasih pasar, kemudian Bulog mengisi cadangannya hanya dengan beras impor? Kalau itu yang dipilih, maka tidak ada pengaruhnya dengan penentuan HPP. Akan tetapi, kalau ingin menyerap produk dalam negeri, maka perlu menyesuaikan harga pembelian Bulog yang sekarang ini 995, karena itu tidak akan mencapai apa namanya, harga beras tidak akan serendah itu. Jadi, pada saat kita memilih untuk menyerap produksi dalam negeri, maka mau tidak mau kita harus mengubah HPP.

Kemudian yang selanjutnya, Badan Pangan memang ada produk-produk..., apa produk pertanian pangan kita memang nggak mampu kita untuk penuh dalam negeri seperti kedelai, bawang putih. Hanya saja, kita harap ada semacam *desain* untuk katakanlah gula pasir kapan kita bisa tidak impor, bisa dengan demikian BUMN diarahkan untuk bekerja ke sana, nah itu. Nah, kalau nggak ada kebijakan-kebijakan yang bisa mengikat kita, maka ya akan begini.

Yang selanjutnya juga, saya melihat bahwa BUMN sudah harus didorong masuk di sektor pangan ini karena swasta sudah masuk, swasta sudah masuk. *Nah*, kalau swasta sudah semakin masuk di pangan juga, ya akan menguasai, maka negara akan semakin lemah dikendalikan oleh konglomerasi.

Selanjutnya, ID Food ini saya lihat sudah bagus ID Food ini, sudah ada menanam apa, ada menanam di sini 28.000 hektar. Apa yang ditanam ini, tebu ya? Ada juga padi 8.000 hektar, jagung 6.000 hektar. Saya kira kalau ID Food ini bisa perluas lah, padi 50.000 hektar, jagung 30.000 hektar. Ambil uang dari bank, kerja sama dengan petani. Kalau nggak ada tanahnya, saya kasih tanah di daerah saya.

Yang selanjutnya, Bulog saya katakan tadi Bulog juga perlu diaudit juga Bulog ini karena otaknya sudah sangat komersial. Tidak ada lagi nilai-nilai sosialnya dan peran negaranya. Bahkan, beras impor diberikan kepada pengusaha besar, kemudian dijual oleh pengusaha besar dengan keuntungan tertentu. Saya kira ini sudah di luar daripada misi Bulog. Dengan demikian, saya minta peran Bulog dikembalikan lah sedikit ya, jangan dilampaui menjadi liberal sekali Bulog ini. Terlalu individual, terlalu liberal, sudah mengejar keuntungan penuh, tidak lagi berfungsi sebagai bagaimana Bulog menambah gudang-gudangnya supaya bisa menyerap menjadi cadangan berbagai produk pertanian, bukan lagi itu yang dipikir. Yang dia pikir adalah bagaimana mengimpor sebesar-besarnya, kemudian menarik keuntungan. Saya kira perlu dipikirkan cara berpikir yang keliru ini Pak Direktur Utama Bulog. Kemudian, diawasi juga anak buahnya karena banyak main juga anak buahnya. Bahkan, anak buahnya juga di daerah-daerah itu banyak menghilangkan beras, masih bagus kalau dia jual, menghilangkan beras, bayangkan. Ya disulap, bayangkan itu beras bertruk-truk hilang di gudang nah ini. Nggak ada masuk akal ini beras di gudang hilang bertruk-truk. Jadi, saya minta.

Kemudian, Bulog lihatlah Komisi IV secara utuh juga. Jangan lihat secara individu, nah itu. Lihat secara utuh jangan lihat secara individu itu.

Makasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak SDK, maksudnya itu secara individu? Tolong diperjelas.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya, secara individu itu dilihat ada yang dikasih kerja sama, ada tidak, nah itu. Mungkin yang merasa dekat saja dikasih, tidak dekat nggak ini, atau hanya Ketua saja atau Pimpinan, Anggota biasa nggak mungkin ya.

KETUA RAPAT:

Kalau memang begitu memang harus diperjelas, harusnya sama semuanya, harusnya sama. Nanti tolong diperjelas. Bapak-Ibu yang belum merasa terakses, nanti lapor ke Ketua.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Selanjutnya, juru bicara dari Fraksi PKS, Pak Slamet silakan Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Kepala Badan serta seluruh jajaran,

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, terima kasih dan memberi apresiasi lah sudah membuat kajian terkait dengan kebijakan subsidi pasca panen ya. Paling tidak ada tulisan ini sehingga terkait dengan ini ya di catatan saya untuk melakukan menjaga kestabilan harga beras, sekaligus juga memberikan kepastian petani kita, itu ternyata kajiannya hanya dibutuhkan 3,45 triliun untuk CPP, begitu ya, dan juga untuk kebutuhan dana dalam rangka pengadaan CPP dari seluruh petani kita kan begitu ya Pak ya? Itu hanya 26,5 triliun. Kalau ini untuk kepentingan rakyat dalam khusus menjamin kesejahteraan petani sekaligus juga hadir untuk pangan yang terjangkau, tentu ini menjadi sesuatu yang baik. Tinggal ini pertanyaan saya langkah-langkahnya sudah sampai di mana ini untuk kemudian disetujui sekaligus menjadi program? Saya pikir ini perlu kita dorong ya, jadi sudah ada niat kita untuk melakukan. Ternyata, ketika dikaji subsidi pasca panen tidak besar-besaran amat yang ini memberikan jaminan kepada petani kita akan dibeli seluruhnya oleh Bulog, penugasan oleh Badan Pangan, sekaligus juga memberikan kepastian pangan yang terjangkau oleh rakyat kita. Tinggal pertanyaan saya sudah sampai di mana kajian ini, langkah-langkah apa untuk kemudian diimplementasikan?

Yang kedua, terkait tadi disampaikan oleh Pak Kepala akan melakukan *update* neraca pangan. Apakah ini nanti kalau *update* neraca pangan ini termasuk stok yang di swasta masuk apa nggak? *Nah*, saya pikir ini penting untuk kita ketahui karena saya masih berpikir bahwa hari ini terjadi pangan yang tinggi itu karena negara stoknya tidak bisa memberikan pengaruh yang besar daripada kemudian stok yang ada di swasta. Berikutnya, tadi disampaikan juga terkait penyaluran pangan murah. Ini kan Indonesia luas Pak, pertama dari sisi sasarannya, kriterianya seperti apa, daerah mana yang masuk, sekaligus juga Badan Pangan ini kan bukan kementerian teknis ya sehingga ketika anggap saja bicara tentang *stunting*, sasarannya yang menentukan daerah *stunting* itu dimana, dan pola penyalurannya, pelaksanaannya di lapangan ini seperti apa? Apakah dinas yang terkait

menangani tentang ketahanan pangan atau seperti apa? Ini mungkin perlu dijelaskan karena Badan Pangan bukan Kementerian Teknis yang tidak punya kepanjangan tangan di bawah.

Terkait BDSA tadi kan ada himbauan seperti itu, Pak Kepala, rakyat kita hari ini sudah bisa beli beras saja sudah syukurnya luar biasa. Dengan kondisi ekonomi hari ini, sehingga antara himbauan dan programnya kira-kira nanti supaya masyarakat bisa menjalankan BDSA ini..., B2SA, mohon maaf..., B2SA, B2SA nggak perlu dijelasin ya karena kalau singkatan bisa menimbulkan nanti tadi sudah dijelasin. Jadi, ini langkah-langkahnya seperti apa? Karena tadi, di sisi lain himbauan ini betul gitu ya tapi kondisi masyarakat kita realitasnya untuk bisa beli beras saja dan sedikit ikan asin itu sudah luar biasa syukurnya gitu ya. Sehingga, ini langkah-langkah itu.

Terakhir, tadi kita di rapat dengan Pak Menteri Pertanian ada data yang menunjukkan stoknya lebih besar daripada kebutuhannya. Tapi, kenapa di lapangan harga beras saat ini masih mahal? Jadi ini tentunya antara kondisi lapangan dan data tadi, sengaja tadi saya tidak tanya di Pak Menteri karena ini urusan pengendalian harga ada di Badan Pangan sehingga saya tanyakan di rapat hari ini.

Begitu Pak Pimpinan, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Waalaikumsalam.

Sudah selesai dari juru bicara Fraksi dan sekarang untuk pendalaman para Anggota. Di sini yang sudah mendaftar ke saya satu orang, Ibu Endang, saya persilakan.

F-PG (Ir. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Saya daftar Ketua...

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV, juga disini
Kepala Badan Pangan Nasional,
Dirut Perum Bulog,
Dirut PT RNI dan ID Food beserta anak perusahaannya.
Ibu dan Bapak sekalian,**

Saya hanya menambahkan bahwa tadi B2SA yang sudah dikemukakan oleh Pak Slamet dan teman-teman yang lain, sebetulnya kami di Dapil sudah memetakan ini Pak Kabadan. Jadi ada potensi sayur-sayuran di daerah dataran tinggi. Tapi, tadi fluktuasi harga dan pengolahan hasilnya belum dikemas dengan baik oleh Bapanas. Jadi, kami inginkan ada stabilisasi dan standarisasi harga juga untuk sayuran.

Kemudian, beras Cianjur ini terkenal tapi sayangnya sampai hari ini *plasma nutfah* beras Cianjur ini telah hilang dari peredaran. Kemudian, kalau kita lihat memang Kabupaten Cianjur ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai penyangga pangan. Tapi, kenyataannya tingkat pengeluaran di Kabupaten Cianjur ini sangat tinggi. Jadi, meliputi 45,06% dan angka *stunting*nya juga cukup tinggi 33,7%. Nah, tentu saja saya sudah memetakan ini potensi-potensi yang ada di Kabupaten Cianjur, rempahnya juga bukan main. Jadi, B2SA ini bisa ditumpang dari Kabupaten Cianjur, tapi kenyataannya pasar dari komoditas tersebut belum ditangani dengan baik.

Kemudian, untuk ID Food ini susu sapi kita, kami sudah memulai. Tapi, tadi belum punya sarana pengolahan susu yang berstandar BPOM. Nah, Pak Frans janji ini mau melihat tapi sampai sekarang belum terlaksana dengan baik. *Nah*, tentu saja kami ingin hilirnya itu dibenahi, apalagi nanti kalau B2SA sudah membumi di tingkat nasional.

Kemudian, jagung hibrida, jagung hibrida ini juga potensinya bagus tapi jaminan pasarnya. *Nah*, mungkin Pak Bayu bisa meng-*handle* tentang jaminan pasar dan kalau perlu ada pengolahan yang menjadi tepung jagung. *Nah*, karena tadi penyerapan dari produksi jagung hibrida di tingkat petani ini sebetulnya punya harga yang terbaik. Tapi, karena tidak adanya apa, penyangga sehingga petani-petani kita jadi terpuruk. Nah, kemudian sarana pengolahan juga mohon bisa diperbaiki dengan baik.

Demikian, terima kasih.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Selanjutnya, Pak Hanan Rozak silakan.

F-PG (Ir. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak sekalian,

Saya sedikit saja terkait dengan stabilisasi harga Pak ya. Jadi, ada kebijakan bantuan pangan, gratis ya Pak kalau bantuan pangan. Kemudian ada SPHP. Dua program ini, dua kebijakan ini dilaksanakan, diterapkan, diimplementasikan, tapi tidak signifikan Pak pengaruhnya terhadap apa yang

sasaran akhirnya terkait dengan stabilisasi. Nah, saya kira ini perlu ditinjau lagi ini Pak Kepala Badan, apakah sudah tepat ya menempatkan beras-beras SPHP itu di pedagang-pedagang eceran itu? Apakah tidak seharusnya begitu ya, tidak dimungkinkan begitu, apakah dimungkinkan misalnya SPHP itu buat *outlet* sendiri Pak. Jangan SPHP bergabung dengan beras-beras komersial. Harapannya kan dengan adanya SPHP beras komersialnya tidak dibeli, mereka beli SPHP. Tapi, ternyata tidak, di lapangan tidak signifikan pengaruhnya terhadap kebijakan harga itu. Katanya stabilisasi pasokan harga pangan, *nah* ini di lapangan tidak berbeda. Ini saya sudah tanyakan juga ke Bu Dirut ya, Ibu Direktur di Jogja ya, kebijakannya ini coba dikaji kembali SPHP tidak pedagang-pedagang tapi buat *outlet* sendiri Pak. Di tingkat-tingkat desa misalnya, di tingkat kampung, di tingkat kelurahan, itu dimungkinkan Pak. Kalau di desa ada Bumdes mungkin lewat Bumdesnya untuk SPHP.

Kemudian juga, terkait dengan jagung Pak ya. Jagung impor kemudian dilepas, *nah* melepas jagung di SPHP jagung ini kelihatannya kurang pas juga Pak. Pada saat panen sekarang ada SPHP jagung, harga sudah terpuruk akan bertambah terpuruk lagi. Jadi, harus dikaji benar pada saat kapan ini diimplementasikan dan bukannya sifatnya seperti pemadam kebakaran ya. Benar-benar diprogram, direncanakan secara periodik satu tahun sekali misalnya, pada saat kapan kita harus mengimplementasikan SPHP itu.

Saya kira ini dari saya. Terima kasih.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Selanjutnya, Pak Ihsan Yunus. Puasa kan Pak Ihsan?.

F-PDIP (M.R. IHSAN YUNUS, BA., B.Comm., ME.Con.):

Puasa.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Jadi, ngomongnya singkat-singkat saja Pak.

F-PDIP (M.R. IHSAN YUNUS, BA., B.Comm., ME.Con.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV beserta seluruh Anggota,
Yang saya hormati Kepala Bapanas, Dirut Perum Bulog, Dirut RNI beserta jajaran,**

Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat berpuasa, mudah-mudahan tahun ini Pak Budhy puasanya penuh, Aamiin... Iha ya benarkan?

Saya sedikit saja Pimpinan, tidak panjang lebar. Yang pertama, tadi menanggapi Teman-teman masalah beras SPHP. Ternyata, dari pengalaman Pileg kemarin dan juga Pilpres yang sudah terjadi, ternyata Bapanas ini bukan hanya masalah stabilisasi pasokan dan harga tetapi juga stabilisasi politik Pak. Jadi, ketika Bapak masuk, politiknya bergejolak, tapi waktu Bapak keluar, politiknya stabil. Itu yang kita dengar di media. Maka dari itu, ini menjadi satu pertimbangan penting juga sama Pak Ketua ya, pertimbangan juga di mana banyak sekali jangan sampai masuk ke ranah situ Pak Arief, walaupun saya paham betul Pak Arief tidak masuk ke situ ya. Tapi, nanti setelah 20 Oktober mungkin ada posisi-posisi baru. Yang pasti tolong dipastikan betul waktunya Pak Arief, ini menjadi sangat pertimbangan untuk teman-teman Bapanas maupun yang lain dalam masa bantuan pangan gitu ya. Yang kita tahu sekarang MK itu baru memutuskan 27 November itu tetap diadakan Pilkada, namun itu interpretasi dari Undang-Undang Pilkada yang lama. Kalau dulu kami di Komisi II KPUnya, karena yang satu-satunya boleh memberikan pendapat mampu atau tidak menjalankan tahapan pemilu itu KPU Pak, bukan MA, bukan MK.

Jadi, masih ada kemungkinan kalau misalkan Undang-undang Pilkadaanya dibahas lagi masih ada kemungkinan September untuk Pilkada. Jadi, ini...., bukan, maksudnya kan tadi stabilisasi politik Ibu Anggi, bukan stabilisasi pasokan dan harga saja begitu. Jadi, sebagai pertimbangan Pak, itu yang pertama.

Yang kedua, SPHP itu ternyata ini juga jadi pertimbangan Bapak, ternyata di lapangan sudah kita pantau masih banyak data-data yang tidak benar. Yang harusnya tidak dapat, dapat, walaupun saya paham pasti Bapak ke DTKS larinya begitu kan? Nah *Oh sorry sorry*, bantuan pangan itu secara data masih amburadul. *Nah*, ini saya tanya bagaimana apa dari pihak Bapanas maupun Bulog untuk menyikapi ini. Kalau kita diam-diam saja semua walau kita tahu data ini rusak, data ini tidak benar, maka kita akan membiarkan ketidakbenaran ini terus berlangsung. Saya rasa harus ada semacam apa ya, *shock therapy* atau *treatment* khusus lah Pak untuk masalah data ini dan ini tidak hanya DTKS saja tapi termasuk DPT juga banyak yang salah, Ketua. Tapi, ini nggak ada hubungannya antara bantuan pangan dan juga DPT, Pak Ketua.

Yang terakhir, saya mau bertanya mengenai persiapan impor dari Pak Arief, karena tadi kita baru mendengarkan dari Kementerian Pertanian. Mereka sangat takut sekali dengan adanya krisis pangan yang pasti hampir dipastikan oleh Pak Kementan akan terjadi. Bahkan, tadi sempat ada *statement* di luar sidang kalau misalnya luasan lahan tetap di angka 200.000 hektar padahal kita 31 juta hektar untuk memenuhi permintaan, maka akan ada *demand* sebanyak 10 juta beras yang harus diimpor. Nah, ini saya rasa menjadi perhatian kita semua bagaimana kalau *worst thing happened* apakah Bapanas sudah siap? Karena kita tahu bahwa sekarang yang namanya negara-negara penghasil beras juga mempunyai *constraint* atau punya keterbatasan untuk ekspor dengan adanya *El Nino* yang terjadi di seluruh dunia.

Saya rasa itu, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Terakhir dari Anggota, Pak Novri Ompusunggu, silakan.

F-PDIP (NOVRI OMPUSUNGGU, S.H. M.H.):

Makasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pangan Nasional,
Direktur Perum Bulog dan para mitra yang hadir pada sore hari ini,**

Pertama-tama Pak, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Novri Ompusunggu yang sekarang Komisi IV. *Nah*, jadi saya pendatang baru Pak, kemarin saya ada di Komisi III DPR RI. Jadi, baru pindah hari ini.

Dalam hal ini saya ingin menyoroti tentang mahalannya beberapa harga 9 bahan pokok Pak, terutama beras yang di mana-mana sekarang itu ngantri di tengah masyarakat. Sepertinya, permasalahan sembako sembilan bahan pokok yang selalu menjadi permasalahan klasik menjelang Ramadhan dan hari besar, terlebih operasi pasar seperti di pemadam kebakaran yang bersifat sementara, namun tidak pernah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan tahan lama.

Kemudian, saya minta Badan Pangan, Bulog, dan *stakeholder* lainnya untuk dapat sinergis dalam menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya. Jangan sampai ada perbedaan data terkait permasalahan pangan yang akan berdampak pada masyarakat karena saling klaim data.

Kemudian yang terakhir, saya minta penjelasan terkait dengan adanya wacana impor beras dari Thailand kalau nggak salah Pak, pemberitaan-pemberitaan. Bagaimana mungkin bangsa ini dapat mewujudkan swasembada pangan, jika tiap tahun kita selalu melakukan impor beras dengan alasan stok domestik kekurangan. Di satu sisi Badan Pangan, pemerintah, terus menjaga keseimbangan ketersediaan beras dengan nilai tukar petani tanaman pangan.

Demikian Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Terima kasih kalau sudah selesai. Kalau kita lihat dari neraca pangan kita sudah impor hampir tiga juta lebih ya Pak Arief?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

2024 500.000, tahun lalu 3,2, Bulog sekitar 2,8 Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Jadi, kurang lebih 2022 sama 2023 berapa yang sudah berjalan?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

2023 dan 2024 sekitar 3,7.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Kalau kita mengacu dari data ini Pak Arief ya, 2022, tayangin coba yang tadi saya minta, bisa nggak? Ini, tadi kan ini ini karena tadi saya katakan Dirjen TP itu Dirjen Tipu, tipu data. Kalau kita lihat di sini 2022 dikatakan itu kan ada surplus 1 juta. Saya masih ingat betul pada waktu itu pejabatnya tidak bertanggung jawab mengatakan surplusnya ada yang bilang 7 juta, ada yang bilang 9 juta, waktu itu sampai kita bedah, betul nggak Pak Yanto? Bulan Desember akhir, ya kan, yang sampai saya kasih pelajaran untuk mengecek langsung ke penggilingan berapa jumlah stok di penggilingan? Pejabatnya hanya menjawab 60 ton misalnya contohnya, Anda tahu kan, ternyata begitu dicek nggak ada kan, *oh* ternyata cuman ada 60.000 kg. Semudah itu menjawab, mengelak tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat tinggi. Itu yang saya nggak suka, maka selalu saya katakan tolong..., tolong data yang benar itu yang mana. Tahun 2023 juga sama surplus 1 juta ton, tapi ternyata masih impor kurang lebih 3,2 juta ton. Kan begitu kan, oke cukup data ini. Jadi, kalau kita lihat data ini ya kan, saya nggak yakin kalau kita ini cukup sampai bulan Mei atau Juni, itu untuk masalah beras.

Masalah jagung iya kan dikatakan kan kita selalu surplus, nyatanya jagungnya kan nggak ada, berkali-kali dalam rapat kerja dalam RDP saya katakan apakah hukum dagang masih berlaku di Indonesia? *Supply and demand* kan menentukan untuk masalah harga ini.

Kemarin kita ada ke Lampung juga bersama ID Food mengecek harga beras dan lain-lain. Ini kan terjadi kerancuan di masyarakat terutama dalam penyaluran beras SPHP. Maka, saya juga bingung Dirut Bulog ini *kok* beras SPHP awalnya hanya untuk pasar modern, itu *loh* yang saya nggak suka. Interaksi itu selalu dihitung dari pasar tradisional, nggak ada itu dihitung di supermarket, minimarket, nggak ada. Boleh dikatakan rakyat Indonesia 70% sampai 80% lebih itu masih belanjanya ke pasar tradisional. Maka, kemarin saya juga minta sama Ibu Febby dampingi saya ke Lampung saya langsung minta jangan hanya Kota Bandar Lampung sebagai barometer, contohnya jangan juga sampai Pasar Induk Cipinang. Saya maunya ke seluruh kabupaten, seluruh kabupaten di Provinsi Lampung, kabupaten kota dicek jumlah pasar berapa, kemudian SPHP nya berapa di situ. Tapi, dengan ketentuan dikasih sanksi yang berat. Apabila ada dinaikkan harga jualnya, laporkan ke polisi.

Di situ kan dia sudah ada margin dari harga 9.900 ya betul? Mereka menjual 10.900. Itu sudah untuk loh, dia jual satu sak itu sudah untung 50.000 kan? Kan cukup besar itu keuntungannya. Kalau hitung dari harga itu untungnya hampir 20% *loh*, betul nggak? Ya ini kan saya bingung juga *kok*

seolah-olah jadinya nggak benar ini. Saya minta SPHP itu jangan hanya di pasar modern tetapi juga di pasar-pasar tradisional, diperbanyak saja. Ini untuk masalah beras.

Kemudian, untuk masalah jagung tadi dikatakan jagung Indonesia cukup. Kalau saya katakan hari ini masih kosong Pak. Kalau cuman berita itu kan belum tentu valid, saya katakan bukan nggak valid, belum tentu valid. Contohnya, hari ini kalau peternak beli jagung dengan harga 4.000 ada *nggak* dengan harga 15? Ada nggak Pak Arief? Nggak ada kan. Maka, kalau ada yang bilang wah harga jagung 2.000 ya masih di tangkainya, itu bisa ya kan, kemudian dipotong refaksinya berapa? Rendemennya berapa? Pemipilan berapa ongkosnya? Angkutnya berapa?

Nah, masalah harga beras HPP sekarang masih 5.000 ya Pak Arief ya? gabah kering.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

GKP 5.000.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

GKP tadi, Pak Arief mengatakan biaya produksi berapa?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

2.700.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

2.700. Kalau kata Pak Dirut Bulog berapa Pak? GKP?

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

GKP kalau dilihat dari harga kenaikan harga pupuk, kenaikan harga sewa lahan...,

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Pakai mic Pak...

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Kalau dilihat dari harga kenaikan harga pupuk, kenaikan harga sewa lahan, kenaikan harga upah, pasti di atas 5.000 Pak. Saya belum punya hitungan pastinya, tapi hampir pasti di atas 5.000.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

5.000 dengan kadar air?

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Kan kalau yang harga 5.000 itu kan apa namanya, dasarnya 4.700 sekian kalau nggak salah biaya pokok produksinya.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Ya, biaya produksi kita bicara biaya produksi gabah ya,

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Ya.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Kalau jadi beras?

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Kalau jadi...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Kalau dari 47 kurang lebih berarti 9...

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

9 ya 92..., 91.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

92 *dong*, 92 ya... berarti kan enggak ada kenaikan harga yang signifikan sampai hari ini. Kenapa pemerintah tidak menaikkan seperti yang saya katakan sama Pak Arief tadi, karena tadi kan Dirut Bulog nggak ada. Maka, saya ulangi lagi kenapa pemerintah tidak menaikkan HPP supaya ada patokan. Contoh di beberapa negara mereka menghitung biaya produksi berapa. Misalnya untuk beras gabah kering giling 4.000 ya kan, selama itu di pasar ditetapkan HPP 4.400 berarti ada margin 10%. Kalau di bawah harga itu, Bulog wajib menampung. Jadi, petani itu tidak akan dirugikan ya. Contohnya ini Thailand kan metodenya seperti itu kan. Maka, terjadi masalah dengan Perdana Menteriya Srettha Thavisin, ini contoh-contoh seperti ini harus kita lihat. Kita hitung dulu berapa *sih* biaya produksinya, baru pemerintah tetapkan. Tapi, nampaknya kan ketakutan terjadi inflasi apa segala macam.

Mungkin Pak Arief masih ingat 2022 Desember ya saya ulangi lagi tadi tidak ada Dirut Bulog. BPS mengatakan terjadi inflasi 0,003% sedangkan waktu itu ada kenaikan beras hampir 1.000 rupiah tahun 2022 ya kan. Nah, kira-kira ini..., kira-kira ini tadi kan Pak Arief ikut rapat ini ya kan, tahun 2024 berapa banyak kita impor hingga cukup memenuhi kebutuhan rakyat di Indonesia? Itu masalah beras dulu dijawab dulu. Nanti, ada yang lain lagi.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Terima kasih Ketua. Boleh *slide* halaman 27 untuk menjelaskan. Halaman 27, jadi Ketua, Bapak-Ibu Anggota Komisi IV yang saya hormati, halaman 27. Kenapa harga beras naik? Harga beras naik itu harga beras itu apa kata harga gabah, kita semua sepakat. Pada saat harga gabah di atas 8.000, Ketua, kemarin sampai ada dekat-dekat 9.000, maka agak sulit untuk harga beras 13.900 seperti HET. Delapan bulan terakhir ya, sampai dengan Februari 2024 produksi versus konsumsi itu memang negatif terus Ketua ya. Ini tanpa melihat stok sebelumnya ya, ini benar-benar murni produksi versus konsumsi.

Apabila Ketua sampaikan tahun 2022, data BPS KSA, Kerangka Sampel Area lebih 3,4 juta ton itu demikian adanya. Tapi, kebutuhan kita sebulan itu kan sekitar 2,5-2,6 juta, Ketua.

Kemudian, kalau kita lihat grafik halaman berikutnya...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Tapi, tadi data BPS 30 juta *loh* kebutuhannya, data BPS. Kalau kita sandingkan data produksi ya sandingkan juga data konsumsi, harus BPS juga kan?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Betul Ketua, jadi ini luas panen yang terus menerus turun. Turunnya sekitar 200.000 ya hektar kemudian produksi dan versus konsumsi ya dua paling kanan, Ketua. Jadi, tahun 2022 produksi 31,54 jumlah konsumsinya 30,2 juta sehingga lebihnya sekitar 1,3 juta. Kemudian, di tahun 2023 ini sudah terakhir, lebihnya hanya 490.000 ton, Ketua, padahal kebutuhan kita bulanan itu memang 2,5. Jadi, stok itu hanya parpar saja, Ketua.

Kemudian, di grafik berikutnya nah, jadi sebenarnya grafiknya ini kalau kita lihat Januari, Februari, Maret, itu memang kita di bawah tahun lalu Ketua ya. Ini penjelasan kenapa kita perlu mempersiapkan, ini nanti bukan dibilang penjelasan importasi Ketua, tapi Badan Pangan harus menyampaikan bahwa kita harus punya stok sebelumnya supaya Bulog itu punya cadangan pangan di atas 1,2 juta ton Ketua.

Jadi, kalau kita lihat seperti ini ya, maka analisa kita sampai dengan bulan April ya, kita baru positif 0,53, berarti, 530.000 ton, sedangkan yang berikutnya berarti yang tahun lalu kita punya produksi lebih tinggi ya berarti sekarang itu ada *gap*, *gap* itu yang harus dipenuhi apakah dengan mempercepat tanam, menyiapkan benih, pupuk, bibit, dan lain-lain, dan yang terakhir adalah alternatif yang paling pahit melakukan importasi. Tinggal dipilih Ketua, tetapi tentunya pemerintah mempersiapkan cadangan pangan pemerintah Bulog harus minimal 1,2 juta ton. Ini penjelasannya Ketua, mengenai beras begitu.

Jadi, dari grafik ini Januari, Februari, Maret, memang ada tunda tanam ya apabila saudara kita Kementerian Pertanian tanamnya lebih dari 2 juta hektar tanamnya, maka kemungkinan besar itu produksinya bisa di atas 5 juta Ketua. Tapi, dengan catatan tanpa ada banjir, tanpa ada *disaster*, dan lain-lain. Jadi, ini analisa dari kita Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Pertanyaan saya tadi simpel Pak Arief, kira-kira kita butuh berapa 2024 impornya? *Kan*, pertanyaannya simpel.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Gini Ketua, bagaimana pun juga amatan dari setiap bulan berapa yang bisa dipanen itu menjadi penting Ketua. Karena ini *kan* masa tanam Januari-Februari, tiga bulan kemudian, tiga bulan kemudian ya.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Jangan nanti ikut Wandi P400, jangan.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Nggak Pak, jadi setiap tiga bulan itu amatan itu akan *terupdate* berapa lahan yang ditanam di setiap bulan. Itu yang menjadi acuan kita Pak. Pada saat Menteri Pertanian menyampaikan lebih dari 1 juta, berarti kita kurang lebih kita 2,5 juta akan *secure*, tapi Bulog pada saat yang bersamaan juga kita mempersiapkan supaya stok masuk terus ya 1,2 ya. Kalau sekarang kondisinya seperti hari ini harga masih tinggi, ini panen belum *full* di seluruh wilayah.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Apa jalan keluarnya? Ya kita simpel saja kan, saya kan simpel.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Yang panjang..., yang jangka panjang tanam Ketua karena kita kan nomor satu produksi dalam negeri...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Jangka pendeknya?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Jangka pendeknya impor. Kalau bicara jangka pendek ya impor, tapi kalau bicara jangka panjang kita persiapkan semua bersama-sama. Ada juga sih jangka pendek tapi diversifikasi pangan, tapi nggak semua orang karbo bisa langsung makan ubi, makan singkong, makan sagu begitu ya. Kecuali memang kearifan pangan lokal, Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Pak Arief, yang saya tanyakan solusi penurunan harga bukan stok. Solusi penurunan harga dalam waktu jangka pendek ini bagaimana? Misalnya gini, ini Maret-April apa solusinya supaya harga jangan naik lagi *lah*. Coba, saya..., saya masih belum paham apa yang, solusinya apa? Apakah dibanjiri pasar tradisional dengan SPHP atau bagaimana atau bagaimana? Saya masih belum paham sampai hari ini. Tolong bantu saya.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Ketua, izin teori *supply and demand* yang Ketua sampaikan beberapa kali itu masih. Jadi, pada saat GKP kita masih di atas 8.000 itu kan berarti produksi masih di bawah ya, produksi ini masih di bawah. Di bulan Maret dan April di dalam grafik tadi itu *projection* ya, Maret mulai tinggi, April tinggi ya ini. Pada saat bulan Maret-April ini hampir dipastikan harga beras akan terkoreksi karena GKP akan terkoreksi. Seperti saya tadi jelaskan, bahwa malah kita harus jaga harga GKP ini tidak turun seperti *slide* sebelumnya. Karena sebelumnya 8.600, 8.700, hari ini 7.020, beberapa tempat sudah ada angkanya di bawah ya. Sekarang sudah 6.950, Ketua, ini diinput oleh Dinas Urusan Pangan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Jadi, kalau melihat seperti ini dan ini tren perkembangan harga GKP, malah kita harus jaga NTPP petani. Kalau grafiknya seperti ini, biasanya perlu waktu...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Kalau 8.000 NTP nya berapa?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

NTPP coba dilihat 120,30% yang terakhir Ketua untuk NTPP, mana grafiknya?. Grafik NTPP, nah ini Ketua yang kiri bawah. Ini tanaman pangan posisinya 120,30%.

Pada waktu kita sampaikan paparan dalam forum Komisi IV ini, waktu itu disampaikan apabila melakukan importasi maka harga GKP akan turun begitu ya. Waktu itu kita sampaikan bahwa importasi yang dilakukan akan terukur. Jadi Ketua, importasi yang dilakukan saat ini oleh Bulog itu sangat terukur sehingga tetap menjaga Nilai Tukar Petani.

Demikian Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Oke, walaupun saya masih belum puas dengan jawabannya kita sudah mau menghadapi Idul Fitri. Kebutuhan pokok daging, telur, ayam, dan lain-lain akan cukup meningkat tajam ya. Di Bulog ada stok daging berapa? Di Berdikari

berapa? Coba terutama daging kerbau atau sapi di ID Food berapa untuk persediaan. Kalau data ini kan kurang lebih 94,25 ton, 94 ribu ya?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Izin Ketua, untuk daging sapi ID Food belum melakukan importasi. Kemudian, untuk daging kerbau Bulog juga belum melakukan importasi tahun 2024. Jadi, dua-dua belum melakukan importasi sama sekali.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Jadi, stoknya 94 ton plus 24 ton.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

24 ribu, Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

24 ribu ton.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Iya,, tapi, ada lebih dari 145.000 ton yang *private* lakukan importasi untuk daging sapi.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Private pengertiannya?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Maksudnya swasta, Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Apakah swasta boleh mengimpor daging sapi menurut peraturan?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Boleh Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Jadi, harganya pun nanti suka-suka swasta *dong*?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Kita kontrol sama-sama, Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Kontrolnya bagaimana? Kalau ada orang jual sapi lebih mahal, dia bisa tangkap, *kan* nggak juga.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Paling ideal stoknya tetap ada di BUMN, Ketua. Sehingga, kita dorong supaya BUMN punya cadangan pangan. Sampai hari ini belum dilakukan importasi.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Bulog ada rencana impor daging kerbau di 2024 persiapan lebaran?

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Sudah di..., sudah diputuskan tapi sampai dengan saat ini izinnya belum keluar.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Maksudnya izin rekomendasi dari Pertanian atau dari Perdagangan?

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

PI belum keluar. PI nya belum keluar.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

SPI.

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Iya, Surat Persetujuan Impornya belum keluar.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Oh, berapa lama itu kira-kira. Misalnya, SPI keluar hari ini berapa lama daging kerbau sampai di Jakarta? Misalnya Jakarta dulu *deh*.

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Kurang lebih tiga minggu sampai satu bulan.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Ya, kalau satu bulan sudah lebaran. Ini bagaimana ini? Ya kalau nggak makan daging ya makan ikan. Karena tadi saya lihat NTN-nya nelayannya cuman 101 *loh*. Kalau begitu kita kurangin makan daging, kita makan ikan saja

supaya nilai tukar nelayannya 101 jadi 110 kan. Maka, saya berkata nggak bikin rendang loh, saya katakan kurangi konsumsi daging, makan ikan ya. Makanya, kau harus banyak makan ikan, jadi kau cerdas San. Karena slogannya Kementerian Perikanan begitu KKP, "Makan ikan cerdas".

Ya, jadi ternyata belum keluar izinnya, jadi nanti bermain di sekitar sini lah daging kerbau 24.000, daging sapi 94.000, 94 ton. Ini yang masalah adalah tadi dikatakan oleh Kepala Badan *private*-nya atau swasta yang akan menguasai pangan. Ini yang saya kurang setuju. Kenapa saya nggak setuju? Kok pemerintah mau diatur akhirnya sama swasta.

Ini contoh-contoh lain ya kita bilang contoh lain, contoh lain. Penerbangan domestik se Indonesia itu dikuasai oleh Lion Group, sekian puluh mungkin 50% lebih, 60% ya kan. Kita punya penerbangan BUMN yang sangat mewah sekali sekian puluh tahun itu tidak menguasai, ya mungkin ya di bawah 10% lah sekarang pesawatnya juga nggak ada, kadang terbang kadang nggak. Coba kita pikirkan bagaimana seorang Lion kalau bicara semua pesawat saya *grounded*, kalau nggak saya nggak dapat subsidi sekian ini misalnya. Celaka lah kita, maka harus dipikirkan apalagi ini kebutuhan masyarakat banyak loh, pangan ini adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa digantikan.

Kalau tadi Pak Arief mengatakan misalnya makanan pengganti, 2009 saya sudah duduk di sini bersama beliau ini sebagai Wamen, semua kan omong kosong. Saya sama Ketua saya dulu Komisi VI Pak Romi ke Lampung *wah* dari singkong dijadikan beras, *wah* begini-begini hanya sekali lewat senyap. Kemudian, porang senyap, ini senyap. Ini yang saya khawatirkan, saya maunya pemerintah memonopoli masalah pangan, jangan swasta.

Satu lagi ini yang paling penting, ya kan, nanti Pak Arief sampaikan saja ya kan, kalau saya buka di sini kan nggak enak semua. Tupoksi Bulog di samping daging adalah Pajale (Padi, Jagung, Kedele) tapi kedelanya sudah dikuasai swasta. *Nggak* lama lagi Pak, jagungnya dikuasai swasta, *nggak* lama lagi berasnya dikuasai swasta. *Wassalam* Bulog.

Jadi, tadi Pak Suhardi Duka mengatakan masalah Bulog gini gini gini, kalau kata saya ya regulasi yang salah. Karena apa? Karena Bulog ini satu sisi harus profit, satu sisi sebagai badan penyangga pangan, betul nggak Pak Arief? Kalau nggak profit, dia nggak kebayar hutang. Hutang Bulog ke pemerintah sudah bayar belum yang dulu rusak? Pak Yamto jawab. Pakai *mic* supaya saya dengar.

DIR. SUPPLY CHAIN & PELAYANAN PUBLIK (MOKHAMAD SURYAMTO):

Untuk tagihan bantuan pangan dan SPHP akhir tahun lalu sudah dibayarkan 9 triliun, Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Belum dibayar?

DIR. SUPPLY CHAIN & PELAYANAN PUBLIK (MOKHAMAD SURYAMTO):

Sudah Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Sudah.

Yang saya tanyakan tadi gula, gula yang waktu itu Anda beli mahal ...

DIR. SUPPLY CHAIN & PELAYANAN PUBLIK (MOKHAMAD SURYAMTO):

Gula belum Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

13.000 sekian, kemudian Anda jual 11.000 sekian.

DIR. SUPPLY CHAIN & PELAYANAN PUBLIK (MOKHAMAD SURYAMTO):

Gula masih tersisa 185 miliar belum dibayar sampai sekarang.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Wah, sudah berapa tahun itu?

DIR. SUPPLY CHAIN & PELAYANAN PUBLIK (MOKHAMAD SURYAMTO):

2018, Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Beras disposal?

DIR. SUPPLY CHAIN & PELAYANAN PUBLIK (MOKHAMAD SURYAMTO):

Sudah Pak, disposal sudah dibayar.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Waktu itu kan ada beras disposal kan dibeli berapa, jual berapa. Kalau nggak salah impornya tahun 2018, yang konon katanya waktu itu masih surplus 2 juta berapa impornya?

DIR. SUPPLY CHAIN & PELAYANAN PUBLIK (MOKHAMAD SURYAMTO):

Impor 2018 1,8 juta.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Nah, 1,8 juta. Ini jaman Pak ini nih, TP ada kan? Betul? Surplus nggak? Nah iya. *Nggak* maksudnya supaya jelas ini ya kan. Gula, selisih harga gula 160 miliar itu gede loh, belum bunganya. Bunganya bunga swasta lagi. Bunga komersial? Bagus Bulog nggak bangkrut ini.

Jadi, saya berharap ya kalau bisa serap dalam negeri ya serap dulu. Tapi, kalau tidak mencukupi ya itu keputusan ada di pemerintah. Kami hanya fungsinya hanya pengawasan.

Kemudian, ID Food apalagi anak bisnisnya? Anak perusahaannya bisnisnya supaya saya bisa tahu.

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

ID Food yang menyangkut pangan ada Berdikari untuk daging, SHS untuk bibit, kemudian ada tiga anak perusahaan gula, kemudian ada Perindo untuk ikan, kemudian selebihnya ada perusahaan *trading* dan perkebunan.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Perindo nggak datang?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Perindo tidak Pak, yang datang Berdikari dan SHS yang biasa terkait dengan pertanian. Perindo besok Pak dengan KKP.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Ini juga besok datang begitu?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Ya Pak, dengan KKP.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Datang juga kan?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Ya Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Kalau kata *you* Perindo perusahaan sehat nggak?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Tidak Pak, sekarang lagi... izin menjelaskan sekarang kita juga lagi ikut program *restructure* untuk anak perusahaan yang sakit, salah satunya Perindo.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Nggak, bicara *emak* perusahaan dulu ini. Jangan anak, Perindo kan *emak* perusahaan ini, untuk bagus nggak?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Perindo anak?

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Perindo bagus nggak?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Lagi sakit.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Oh sakit, padahal Perindo itu mengelola pelabuhan ya, mengelola dan meng-*collect* uang sewa pelabuhan tapi masih rugi. Ini yang saya bingung, iya kan? Berapa triliun kerugiannya?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Satu tahun sekarang *sih* tidak sampai 100 miliar, namun mewariskan hutang kurang lebih 600 Miliar dan kebanyakan yang Bapak sampaikan tadi pengolahan pelabuhan itu adalah sewa jangka panjang. Uangnya sudah ditarik di depan dulu sehingga...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Saya tahu, saya tahu *you* nggak usah ngomong saya tahu *kok*. Jadi, pejabatnya dulu kan kalau bisa 100 tahun gue sewain 100 tahun ini, ambil dulu duitnya dimuka *nih*. Urusan nanti, urusan nanti. Akibatnya apa? *You* lihat pelabuhan Muara Baru, itu kalau saya nggak ngamuk-ngamuk ke sana pelabuhan terbesar di Indonesia yang dikelola oleh Perindo, bau, banjir, becek. Saya minta ini diperhatikan ini, karena Perindo itu kan asetnya banyak *loh*. Setahu saya di Sorong ada, di Ambon ada, ya kan,

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Di Bacan di Indonesia Timur.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Di Bacan juga besar, besar sekali itu. Coba, kalau bisa dikerjasamakan sama pihak ketiga supaya mendapatkan mengurangi kerugian yang tadi disampaikan per tahun sampai 100 miliar.

Kalau Berdikari bagaimana?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Berdikari fokus bisnisnya sekarang untuk Ruminansia dan Poultry Pak, unggas. Kalau unggas itu untuk importasi GPS kemudian dibesarkan, dijual GPS nya.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Importasi GPS nanti dijual lagi nggak? Jadi calo begitu enggak?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Nggak Pak, mereka ada dua kandang untuk pembesaran.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Kandang sewa atau kandang milik?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Sewa Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

Ya sewa, saya tahu *kok*. Yang di Rumpin masih sewa?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Yang di Banten dan di Jawa Timur saja.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

GPS satu tahun dapat berapa?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Tahun lalu 38.000, Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E.):

38.000. Jumlah GPS yang diinput ke Indonesia berapa? 500 lebih?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Kurang lebih 600.000, Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Kalau SHS apa kerjanya sekarang?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

SHS fokusnya buat benih padi di Sukamandi dan pengelolaan 3.200 sawah Sukamande.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

3.200...?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Hektar sawah.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Jumlah luasannya berapa itu Sukamande?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Untuk SHS secara keseluruhan juga rugi sama dengan Perindo Pak karena hutangnya cukup tinggi.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Eenggak, luas lahan SHS ada berapa?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

3.200 hektar.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

3.200. Yang digarap masyarakat?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

80%.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Solusinya bagaimana?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Kita sekarang perlahan-lahan mulai ambil alih tata kelolanya Pak. Karena memang sewa menyewa itu sudah berlangsung 2 sampai 3 turunan Pak. Jadi, kita mau ambil pelan-pelan ke mereka untuk sebagian diolah, sebagian kami mitrakan kepada mereka Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Kalau saya lihat kan di sini ya, apa bedanya Anda, Perhutani, Inhutani, PTPN, sama SHS? Sama gitu *Iho*. Kalau Direksi saya yakin nggak berbuat yang nggak baik lah. Tapi, orang yang di lapangan kan menyewakan kepada pihak kedua. Kemudian dia malas, dia sewakan kepada pihak ketiga, dia dapat cari untung. Solusi yang terbaik adalah memang Anda tidak... Anda SHS maupun ID Food tidak akan diuntungkan, tapi akan mendapatkan nama yang baik. Kumpulkan masyarakat penggarap yang liar itu yang Anda sewakan, kumpulkan kasih pakai 10 tahun, tidak membayar PBB, Anda yang membayar, dengan catatan 10 tahun selesai, Anda pakai, Anda keluar. Bikin perjanjian melibatkan aparat penegak hukum dan notaris, kasih dia pakai 10 tahun tapi nggak usah sewa, nggak usah pungut, nggak usah PBB pun Anda bayar. Solusinya jangka panjang ya seperti itu. Dari zaman Wawan sudah saya ngomong. Cuman kan namanya Direktur kan biasanya lebih pintar daripada Anggota DPR, jadi nggak didengar sayanya. Coba kalau empat tahun lalu diitukan. Ya kan, betul nggak Pak Arief? Coba, kata Pak Arief betul nggak? Jadi, jangan menggusur rakyat.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Iya, dan biasanya didampingi BPKP dari awal supaya tidak ini Ketua, kadang-kadang kan jadi temuan. Jadi, setiap direksi itu pasti harus mempersiapkan ya kemungkinan-kemungkinan terburuk. Jadi, kadang keputusan direksi itu apabila dilihat sebagai kerugian negara itu kesalahan direksi. Maksud saya, apabila demikian harus tetap ada pengawalan BPKP ya.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Kalau sekarang juga ada kerugian negara *kok*, disewakan di bawah tangan.

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Sekarang semua sudah pakai kontrak

F-PDIP (ONO SURONO, S.T):

Pak Ketua...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Sebentar, kenapa?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Sekarang semua sudah pakai kontrak. Sekarang semua sudah pakai kontrak, jadi seperti yang Pak Ketua sampaikan yang pertama kali kita bereskan adalah supaya tidak ada penyewa gelap. Jadi, semua sekarang sudah benar-benar petani penggarap dan itu semua kita kawal pakai kontrak Pak, itu memang tiap tahun kita kerjakan Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Kontraknya berapa? Berapa musim tanam? Per lima tahun? Per 10 tahun?

DIRUT ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Per tahun Pak.

JAJARAN ID FOOD:

Izin Pak Pimpinan, sedikit *mengupdate*. Per tahun lalu itu kita sudah kontrak langsung ke petani langsung Pak. Memang yang tadi Pak Pimpinan sampaikan itu memang ada pihak-pihak yang menyewakan, itu benar. Per musim lalu kita *direct* langsung ke petani penggarap itu ada 1.800an seluas...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Sewanya berapa?

JAJARAN ID FOOD:

Per musim Pak, seluas 2.700 hektar.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Jadi, per musim dikontrak lagi.

JAJARAN ID FOOD:

Iya, jadi dievaluasi. Kalau nanti mereka ada main-main, barang-barangnya diambil calo ya kita *cut*. Kemarin kita sampai *cut* itu 50-an petani Pak, mafia-mafianya.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Jadi, hasil produksi ini dibeli SHS?

JAJARAN ID FOOD:

Murni sekarang dibeli oleh SHS, dibayar hari yang sama. Kita nggak ada hutang petani lagi.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Berarti, SHS hebat *dong* surplus *dong* duitnya, nggak rugi.

JAJARAN ID FOOD:

Untuk Sukamandinya surplus Pak Pimpinan.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Tapi untuk yang lainnya?

JAJARAN ID FOOD:

Yang lainnya minus. Makanya, sekarang kita sedang masuk di fase rencana penyehatan perusahaan dari Kementerian.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Oke, silakan Pak Ono.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T):

Ya saya sih tadi menunggu terus diskusi Pak Ketua dengan Pak Arief terkait dengan jangka pendek tadi. Tapi, tadi nggak dilanjut tuh. Nah, jadi saya ingin tahu jangka pendeknya bagaimana selain tadi selain tadi impor, ada nggak yang lain. Kalau pun impor berapa target Pak Arief menurunkan harga beras dalam jangka waktu sekian bulan misalnya. Berapa impor yang harus dilakukan? Nah, itu tolong diskusinya dilanjutkan Pak.

Yang kedua, terkait dengan tugas Bapanas terkait dengan kerawanan pangan, saya juga minta skema ya atau perencanaan Pak Arief. Kalau tadi dari sisi analisa harga beras belum turun, inflasi produk lainnya juga terjadi, masyarakat makin sulit. Nah, kira-kira apa yang telah dilakukan Pak Arief yang lalu terkait dengan bantuan, berkaitan dengan kerawanan pangan juga apa gizi buruk ya. Nah, ke depan kira-kira melakukan lagi seperti apa? Berapa jumlahnya? Berapa banyak sasaran masyarakatnya dan waktunya kapan? saya ingin tahu juga terkait apa yang dilakukan Bapak. Beras yang banyak pertanyaan-pertanyaan kemarin beras Bapanas bagi-bagi beras. Bukan tugas pokok dan fungsinya ternyata ada begitu. Mohon dijawab Pak, terima kasih Pak.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Terima kasih Pak Ono. Jawab yang terakhir dulu ya Pak Ono. Jadi di Perpres 66 Tahun 2021 mengenai Badan Pangan Nasional Pasal 15, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;

b. Pengendalian kerawanan pangan.

Jadi, kalau yang tadi kerawanan pangan itu masuk.

c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan ...

F-PDIP (ONO SURONO, S.T):

Pak, saya tidak mempermasalahkannya itu, cuman saya ingin rencana Bapanas itu ada lagi nggak ke depannya? Kalau itu sudah saya tidak permasalahan. Mungkin pihak lain yang mempermasalahkannya, karena saya baca juga.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Baik, terima kasih.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T):

Tapi, rencana apa Bapanas ke depan *nih* karena kan rawan pangannya masih terjadi nih.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Ya, ya, ya baik Pak Ono. Izin menjelaskan.

Kemudian, untuk importasi izin menjelaskan Pak Ono, Bapak, Ibu, Ketua, importasi ini sekarang semua dilakukan sebenarnya berdasarkan NK. NK itu Neraca Komoditas. Di bulan Desember kita semua sudah berkumpul kementerian/lembaga, biasanya mulainya dari Rakornis di tingkat Eselon I, kemudian Ratas dipimpin oleh Menkoperekonomian. Di situ disebutkan kebutuhan impor tahun 2024 berapa, begitu ya. Kemudian, itu dimasukkan ke dalam sistem. Importasi untuk beras ya yang sudah dimasukkan ke dalam sistem, karena tadi salah satu sumber untuk stabilisasi adalah importasi, itu ada 2 juta ton ya yang sudah dimasukkan itu 2 juta ton ya, yang sudah dimasukkan 2 ton. Tapi, Bulog baru mengimpor 500.000 ton, Pak Ono. Kemudian, kalau ditanya perlu berapa lagi? Perlu berapa lagi ya kita lihat amatan tadi. Tetapi, Bulog sudah pegang izin 2 juta ton, tinggal Bulog mengatur kapan waktunya mengimpor ya, kemudian kapan ...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Pak, 2024 3,6 juta ton.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Ya, yang sudah masuk NK baru 2 juta ton. Yang 1,6 juta belum kita tugaskan Bulog Pak. Kan kita sepakat mau jaga harga di tingkat petani. Tapi, kalau mau, maaf ya Pak, izin, kalau kita mau hanya sekedar menurunkan harga

seperti misalnya diskusi kita, banjirin impor selesai harga tetapi kita tidak selesaikan, tidak menghormati petani kita. Jadi, kenapa masih kita tahan 1,6 juta penugasan kepada Bulog, ya 2 juta ini saja bertahap Pak ya 500.000. Jadi, makanya kalau kita lihat NTPP petani itu memang kita jagain, nggak, nggak jatuh seperti dulu Pak.

Kemudian yang kedua, dalam negeri, Bulog saat ini Pak, saya minta Dirut Bulog sudah mulai nanam bersama mitra-mitranya sehingga 10 MRMP yang Bulog miliki itu sudah bisa mulai menyerap gabah dari petani. Kemudian, tadi Ketua sampaikan, ini benar ini Ketua, jadi sudah mulai ya walaupun tidak sebesar yang kita inginkan. Tadi, kalau misalnya levelnya sampai 500.000 itu ideal Pak, karena kita harus serap 2 juta ton. Jadi, 500.000 hektar itu ideal seperti diskusi kita.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua, interupsi Ketua. Saya minta penjelasan sedikit Pak Arief, mengenai impor. Untuk harga Pakistan, Thailand, itu harga beras yang kita beli itu berapa Pak Arief?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Yang detail mengetahui itu Dirut Bulog, tetapi dari laporan itu setiap *bidding* itu berbeda-beda Pak Suhardi. Jadi ada yang 603...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Tapi, bukan ada ketetapan dari Presiden harga tertingginya berapa beras impor?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Ada ketentuan tertingginya Rp11.000,00.

Kemudian, setiap melakukan importasi Bulog itu sebenarnya bisa menjalankan dua, yang pertama B2B, yang kedua G2G. Dua-dua bisa dikerjakan ya, tapi hari ini yang dilakukan Bulog adalah banyaknya B2B. Setiap melakukan importasi tentunya melakukan *bidding* ya mulai dari di cek *requirementnya* ada, kemudian dilakukan *bidding* oleh teman-teman Bulog ya. Harganya bervariasi Bapak, ada yang 630, ada yang 650, itu bervariasi. *Country originnya* yang paling banyak dua negara, Vietnam dan Thailand, ada beberapa negara lain termasuk Pakistan, Myanmar, Kamboja sedikit ya, dan beberapa negara lain. Jadi, semua opsi ini dibuka Ketua, begitu Pak Suhardi Duka.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T):

Sedikit dulu Pak Ketua.

Begini, kalau kita melihat kondisi produksi dalam negeri itu main di kisaran harga terendah nanti 12.000 menurut pikiran saya dan banyak juga analisa bahwa sekitar 12.000. Nah, memang kalau memang harga beras di luar negeri hanya 8.000, ya memang bisa kita interpretasi harga pasar Indonesia dengan impor. Tapi, kalau harga pasar luar negeri juga sekitar 11.000 dan tiba di Indonesia dengan harga 12.000 ya tidak bisa kita intervensi harga pasar Indonesia karena sama juga dengan harga luar negeri. Itu maksud saya Pak Arief.

Terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Ya, tadi Pak Arief mengatakan 6.300 per metric ton hah?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

630.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

630 per metric ton. Ekuivalen berapa kalau hari ini?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Tergantung... tergantung *currency*-nya Pak sekitar 10.800, 10.600, fluktuasinya seperti itu. Pada saat angkanya di atas 11.000, kita harus melakukan *bidding* yang lain karena tidak masuk ya. Itu sampai sini ya Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Kalau beras Pakistan apa cocok dikonsumsi di Indonesia?.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Saat ini masing-masing wilayah punya keunikan Pak, berapa wilayah tertentu sukanya Pakistan, berapa wilayah lagi dengan yang lain, begitu ya Pak gitu.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T):

Pak Arief, dengan 500.000 ton yang sudah diimpor, berapa harga yang turun bisa menjadikan turunnya berapa rupiah harga beras?

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Maksudnya turunnya harga beras di pasaran sekarang untuk dikonsumsi dengan 500.000.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Hampir tidak terlihat Pak pada saat kita sedang melakukan intervensi hanya dengan 500.000 ton, sementara Januari-Februari defisit kita 2,8 juta ton Pak Ono. Kalau kita..., coba tolong ditampilkan grafiknya. Jadi, kalau Pak Ketua bilang banjirkan, ya Pak Presiden juga sampaikan banjirkan. Tapi, kalau defisitnya ya pada 1-2 bulan pertama 2,8 juta ton ditambah beberapa bulan sebelumnya juga defisit, ya agak sulit untuk menurunkan harga dengan hanya 500.000 ton Pak Ono.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Permasalahannya, kalau, kalau dibanjiri bulan... taruh lah tadi Januari-Februari, petani kan belum nanam kan?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Betul.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Nggak ada masalah kan? Kalau dibanjiri tidak masalah kan sebenarnya?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Jumlahnya yang terbatas kan Ketua.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ya, makanya tadi kalau dibanjiri kan seharusnya tidak hanya 500.000 ton, harusnya bisa dimaksimalkan misalnya langsung 2 juta misalnya, terus dibanjiri. Yang jadi permasalahan kan kalau banjirnya itu di bulan Maret-April misalnya karena panennya sudah ada, kan begitu. Nah, kenapa itu kemarin tidak dilakukan oleh Bapanas dan Bulog?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Stoknya tidak, tidak ada 3 juta Pak Ono, stoknya itu hanya 1,2-1,4.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Saya bantu jelaskan. Stoknya hanya 1,2 kalau digelontorkan semuanya berarti CBP nggak ada. Ini yang terjadi kan, betul nggak Pak Arief?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Betul.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

CBP nya nggak ada kan?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Stoknya...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Yang dimaksudkan banjir ini adalah SPHP saat ini untuk jangan hanya kota besar, termasuk kabupaten. Kemarin saya sudah bicara sama Ibu Febby minta sama Ka DP Lampung itu supaya cek pasar-pasar kabupaten kota yang luar itu. Kalau harganya masih 13.000 ya masukkan SPHP itu supaya rakyat bisa membelinya dengan harga 50 ribu berapa? 54 ribu? 54 ribu. Itu yang saya maksudkan, bukan banjir impor, bukan, banjir itu banjir di pasar supaya harganya turun. Kan nggak mungkin setiap hari orang beli beras 5 kg, nggak mungkin lah ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Ya Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Saya juga tertarik ketika solusi jangka pendek, tahun kemarin jangka pendek impor, tahun sekarang jangka pendek impor, tahun 2025 juga jangka pendek lagi. Jadi, saya ingin mendengarkan komitmen dari Badan Pangan, CBP hari ini impor itu kan ada kesalahan dari awal, bukan kesalahan, ada ketidakmauan pemerintah untuk menyerap gabah petani kita. Sumber masalahnya kan di situ sehingga CBP alasannya harus impor. Datanya waktu Pak Buwas itu hanya 2% seluruh potensi panen kita. Kenapa nggak dibeli semuanya? Makanya, dengan apa yang sudah disusun ini saya ingin tahu ke depan untuk... mungkin nggak, saya pikir kita bicara ke depan lebih penting Pak Ketua agar tidak jalan pendek terus. Bahkan, kalau Pak Arief menyampaikan 2 juta, Presiden ngomong mau 3 juta. Di media-media kan tahun 2024 akan impor 3 juta loh di media, silahkan komplain ke media kalau kemudian.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

3,6 Pak, bukan 3.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Ya 3,6. Pak Arief katakan 2 juta. Artinya, saya ingin mendapatkan *planning* nya untuk menyerap petani kita nanti seperti apa? Apakah tetap 2% lagi CBP? Hari ini CBP dipenuhi oleh impor, kenapa? Memang nggak mau menyerap dengan alasan berbagai hal termasuk yang tidak ada relaksasi harga. Makanya, panen tahun ini berapa rencanya? Apakah 100% diserap atau nggak? Karena, kalau ini tidak dilakukan sama Pak, setiap tahun solusinya selalu jangka pendek paling enak impor. Ini nggak bisa kita pungkiri, buka saja data serap pas puncak panen MT I, berapa Bulog menyerap? Nggak lebih dari 3 %, 4%.

Nah, kalau ini nggak dilakukan ya selamanya kita akan menjadi impor. Apalagi kemudian ujungnya kan nanti kepada tata kelola kita. Kalau kemudian beras petani kita dikuasai oleh swasta ya tadi hukum dagang berlaku, siapa yang pegang barang, dia mengendalikan pasar. Sehingga, berapa pun impor tadi disampaikan oleh Pak Arief, 500 ya kayak netesnya apa air di lautan, nggak akan kerasa untuk mempengaruhi harga di pasar, *nah* itu. Jadi, kalau saya lebih menekankan proyek panen, masa panen yang akan datang berapa yang akan dilakukan? Apakah kemudian memang kita *lost* dengan harga seperti itu.

Mungkin itu yang mungkin perlu saya sampaikan Pak Ketua, sehingga jangka pendek ini judulnya jangka pendek tapi setiap tahun dilakukan, bahkan setiap tahun tambah terus terlepas dari *El-Nino*. *El-Nino* hari ini hanya menjadi sebuah pesakitan saja walaupun faktanya memang harus kita sikapi. Tapi, justru manfaatkan ini dibalik semuanya manajemen tata kelola yang memang kurang pas.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN, S.E):

Jadi, nggak perlu dijelaskan. Jadi, begini Pak Slamet, kuota izin yang dikeluarkan untuk 2024 itu 3,6 juta, gitu kan. Dijelaskan dong Pak Arief. Kita anggap diskusi selesai jangan dibahas lagi karena jam 5 kita harus tutup.

Pendapat Anda, Pak Arief selaku Badan Pangan masalah kedelai bagaimana? Saya ingin secara gamblang Anda menjawab. Masihkah tupoksinya untuk Bulog atau dikuasai oleh swasta secara 100% dikuasai swasta. Jadi, kalau besok-besok swasta bilang hari ini gua mau naikin harga kedelai Rp1.000,00 ya naikin lah harga itu. Coba bantu Pak Arief.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Pak Ketua, seluruh kegiatan kita ini sebenarnya muaranya apa... hulunya itu ada di produksi, Ketua. Jadi, Pak Slamet begitu ya, kita bukan suka impor bukan gitu ya, tapi memang kebutuhannya demikian dilihat dari produksinya. Kembali ke kedelai, kedelai itu juga sama, coba dikasih lihat neraca kedelai. Kedelai itu sedikit sekali produksi dalam negerinya ya. Jadi setiap pengrajin tahu tempe itu setiap tahun pasti mengeluh bahwa kekurangan

kedelai. Kedelai sangat tergantung sama importasi. Importasi ada 2-3 perusahaan besar yang di sana.

Kalau Ketua tanya sama saya, saya akan jawab harusnya Bulog saja gitu. Kalau produksi ya...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Kalau begitu kita masukin dalam kesimpulan saja.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Kalau produksi ya, ini kan ceritanya ini yang di merah-merah segitiga itu yang kita impor ya. Jadi, produksi dalam negeri ya nggak nyampai 300.000 ton ya. Ini waktu dengan teman-teman pengrajin ditanya, "Pak Arief, yang 300.000 ton ada di mana?" Begitu, kan. Khususnya untuk tahu bisa karena butirnya kecil, kalau tempe butirnya yang besar ya. Kemudian, importasi itu kalau kita lihat itu kebutuhan tahunan ya, kebutuhan tahunan itu sekitar 2,6. Jadi, angkanya 2,5 juta ton.

Kalau Ketua ingin menanyakan produksi ya tentunya secara bertahap.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Kalau produksi saya nggak tanya karena tidak mungkin terjadi. Jadi, lahannya bilang lahan jagung, lahannya kedelai, lahan padi juga di situ. Jadi, saya nggak bakal tanya maka saya nggak tanyakan masalah produksi kedelai karena saya yakin itu hanya omong kosong. Yang saya tanyakan tadi baiknya bagaimana masalah kedelai. Saya tidak mau hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta, oleh segelintir swasta loh saya tekankan, oleh segelintir swasta. Nggak apa-apa, jawab saja kalau begitu saya masukkan ke dalam kesimpulan rapat supaya jangan dikuasai oleh swasta.

Berarti, swasta ini berapa persen? 95% menguasai loh, produksi kita sampai 5%? Nggak sampai, 2,5?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Ya kalau angkanya sekitar 8 sampai 10%.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Realisasinya? Kenyataannya?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Kalau menurut saya di bawah Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Ya, berarti 2,5% lah kurang lebih. Jadi, 97,5% itu dikuasai oleh swasta begitu kan.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Iya Ketua, Bulog lagi latihan ya. Bulog lagi latihan beras, jagung, kedelai. Jadi, beras sudah melakukan, jagung, satu lagi kedelai, lagi latihan. Latihannya ini 20.000 ton.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Latihan 20.000 ton *mah* bukan latihan Bos, impornya 2,6 juta.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Jadi..., ini kan disuruh jujur, kita kan jujur.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Ya jujur saja nggak apa-apa.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Kalau jujur ini kejujurnya begini Ketua. Jadi, ini latihan.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Nggak punya duit Bulognya?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Bulog punya. Oh iya Ketua, saya lupa *update*. Saya mau berterima kasih sama Kementerian Keuangan jadi untuk Bulog dan RNI itu disiapkan dana murah 28,7 triliun Ketua. Itu tentunya ada turunannya lagi harus kerja sama dengan Asbanda, Himbara, dan *private*. Dana murah ini ya kalau dengan kolateral, Bulog itu 2%, kalau tanpa kolateral bunganya 3%. ID Food juga sama ya, 3% dengan kolateral, tanpa kolateral 4,5%, ini kita...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Kalau begitu Bulog jangan pakai kolateral dong, 3% nggak apa-apa kan?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Ya, ya jadi, ini dicoba kemarin izin *update* sekalian karena ini sudah jalan dalam dua minggu terakhir dengan Himbara, BNI, teman Bulog sudah mulai 6 triliun. Jadi, fungsinya adalah *standby buyer*, jadi *off taker* produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kita ya, oleh petani, peternak. Kita berharap ID

Food..., ID Food juga sama, ID Food ini juga nggak punya uang Pak, untuk meng-*off take*. Sehingga...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Pak Mentan yakin semua sukses tuh kemarin kalau nggak punya uang.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Coba ditanyakan Pak, hari ini kan pasti *challenge* nya ada di Keuangan. Jadi, kalau kita mau ningkatkan cadangan pangan pemerintah, Pak Slamet tadi sampaikan meng-*off take* panen lokal, itu harus punya uang. Jadi, BUMN ini BUMN di bidang pangan karena saya dulu pernah di BUMN bidang pangan dan meng*holding*kan bersama teman-teman ini. Saya paham bahwa ada beberapa anak perusahaan ya memang negatif ya. Itu sedang *restruct* hari ini Ketua. Tapi, untuk ID Food beserta anak perusahaan yang masih sehat itu perkenannya kalau dia punya modal kerja untuk *walking capital* itu akan sangat baik ya.

Jadi, demikian Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Ini perlu kita masukkan kesimpulan untuk...

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Saya tanya kesiapan Bulog ya Pak ya?

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Ya tanya dulu...

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Pak Dirut.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Arief sedikit, sebenarnya...

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Sebentar Pak Slamet, ini masalah kedelai dulu supaya tuntas dijawab oleh Pak Dirut.

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Maksudnya di Bulog yang mengimpor seluruhnya Pak?

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Nggak seluruh lah, kalau seluruh Bapak nggak mampu Pak.

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Lha iya makanya, mungkin mohon jelas apa yang ditanyakan kesiapannya.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Ya, dijelaskan saja secara langsung penugasannya.

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Bulog siap berapa pun yang ditugaskan.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Ya itu, silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Ya, untuk urusan perut kita tadi Pak, membeli petani kita kan menyangkut kesejahteraan. Sebenarnya, justru seharusnya kita tidak membebankan kepada BUMN tetapi murni tugas pemerintah berapa butuhnya. Kalau kajian Pak Arief tadi kan 60..., eh 26 triliun. 26 triliun itu kan kecil untuk urusan kesejahteraan petani kita. Makanya, tadi pertanyaan saya di awal adalah bagaimana *action plan*nya ini Pak Arief meyakinkan kepada Presiden bahwa 26 Triliun itu nggak ada apa-apanya dibanding dipakai Ibu Kota Negara itu yang nggak jelas, kan begitu maksud saya begitu. Jadi, ini menyangkut nasib petani cuma 26 Triliun jangan bebani ke BUMN.

Saya salut Pak Ketua dengan manajemen BUMN kita itu luar biasa, piutang ke pemerintah luar biasa masih bisa jalan itu kan bukan sembarangan begitu. Jadi, hutang triliunan berapa tahun punya piutang ke pemerintah nggak dibayar-bayar tapi masih bisa jalan, itu manajemen yang luar biasa itu. Kita perlu belajar banyak begitu, cerdas. Jadi bagaimana mengakali bisa jalan itu kan ilmu tersendiri itu.

Maksud saya begitu Pak Arief, justru bagaimana Pak Arief meyakinkan Presiden ya untuk 26 Triliun itu kan sama berapa gitukan kecil begitu. Jangan bebani ke BUMN bahwa kemudian pelaksanaan BUMN ya wajar saja. Itu Pak Ketua, terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Mau dijawab nggak? Kalau menurut saya begini mohon maaf ini, kalau BUMN dikasih pinjaman gratis nggak pakai bunga jangan-jangan nanti uangnya ditaruh di bank. *Lho* saya bisa buktikan, saya bisa ngomong ada data.

Dibungakan ke bank, bunganya dipakai untuk operasional, ada itu bukannya nggak ada, saya tahu. Cuma, bukan BUMN pangan, bukan.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Izin Ketua, Pak Slamet, justru dalam forum yang baik ini saya sampaikan bahwa ada kepercayaan dari Menteri Keuangan terhadap pengelolaan pangan karena 27,8 triliun itu ya itu dana murah. Jadi, Kementerian Keuangan akan membayar subsidi bunga selisihnya dari komersial ya. Ini kan sudah ada angkanya 28,7 tinggal setelah ini adalah B2B-nya antara BUMN di bidang pangan ya, ID Food, dan Bulog, dengan Himbara, Asbanda, bahkan dibuka kepada *private* juga. Ini kalau dikasih PMN ya, sepertinya *kok* belum ada ininya ya Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Kalau PNM pasti ke laut.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Ya, jadi sekarang saya rasa cukup *fair* ya. Ini *meeting*nya juga lumayan panjang ya Pak dari 30 kali *meeting* dengan Kementerian Keuangan begitu ya Pak untuk bisa mendapatkan ini. Nah, hari ini kita sudah mendapatkan ini dan kita terima kasih sama Kementerian Keuangan yang sudah menjembatani ini. Dan proses ini teman-teman dari BUMN Pangan tinggal dengan Himbara, Asbanda, sama *private*, begitu.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Artinya, masa panen 2024 ini dengan tadi hutang murah tadi akan terserap semua potensi petaninya, panen dari petani kita. Begitu Pak Arief ya?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Bulog itu ya kita tugaskan penyerapan itu minimal 2,4 juta ton, tinggal Bulog ini menyiapkan Pak. Kenapa 2,4 juta ton, karena sesuai dengan salurnya ya salurnya. Jangan kita *engoff take* kemudian tidak ada salurnya. Nah, salurannya ini salah satunya adalah bantuan pangan, intervensi pemerintah yang lain seperti ya SPHP. Saat ini yang dikerjakan untuk SPHP dan bantuan pangan itu memang murni memang dari importasi Pak Slamet ya. Dan selalu kita sampaikan kalau importasinya 3 juta Ketua, itu artinya giat ekonomi yang 30 triliun itu ada di Vietnam-Thailand tadi. Kalau ini bisa di Indonesia, makanya ini *relate* dengan produksi semua, Ketua, begitu.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Kalau nggak salah pernah ada wacana pemikiran dari Menteri BUMN membuka sawah di Kamboja atau di mana? Waktu itu kalau nggak salah.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Belum ada, Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Ada waktu itu sudah wacana *kok*.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Nggak, maksudnya wacana ya. Tapi, belum dikerjakan sama sekali. Jadi, waktu itu dengan Presiden, *eh* dengan Perdana Menteri Hun Sen, kemudian berikutnya Pak Hun Manet ya itu mengundang kita investasi untuk investasi di sana. Karena gabah-gabah yang ada di Kamboja itu memang gesernya ke Vietnam. Jadi, kalau memang masih ada lakukan importasi dan lainnya, bagusnya di sana ya. Kalau itu diperlukan untuk Indonesia, jadi kita nggak cari-cari, tapi kalau tidak diperlukan biar *trading* di luar. Kira-kira wacananya demikian Ketua, gitu. Jadi, punya stok *secure stock* tapi bisa *ditradingkan* di luar.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Sebetulnya, itu suatu pemikiran yang sangat cerdas sekali. Sangat cerdas sekali ya. Tapi, perlu diketahui kalau Kamboja bilang dia krisis pangan, di gak mau kasih dia punya bagaimana? Maka, nanti kalau ketemu ya itu pemikiran yang cerdas. Ingat *loh* Kamboja itu tidak ada perjanjian karantina dengan Indonesia, betul? Ya kan? *Nah*, kenapa tidak segera dilakukan protokol karantinanya?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Sudah Ketua, jadi yang pertama kita ada diskresi, berikutnya kita akan urus ya dengan Badan Karantina Indonesia juga, teman-teman Bulog kan juga akan melakukan itu tapi itu *step-step* setelah 12 tahun....

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Pemikiran saya bingung, gini ya.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Ya.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Saya ketemu pemerintah Turki, mereka mengatakan *kok* mengurus protokol karantina susah sekali dengan Indonesia. Potensinya banyak dari Indonesia ekspor ke Turki. Dari Turki itu kacang-kacangan banyak sekali bisa dimasukan impor ke Indonesia. Itu 3-4 tahun bahkan dubesnya sama saya sudah ngeluh mengurus protokol karantina sangat sulit sekali, iya kan. Jadi,

jangan salahkan GACC kalau barang kita ekspor ke Tiongkok dipersulit karena kita juga mempersulit benar begitu kan? gitu.

Ada yang mau disampaikan lagi?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sedikit Pak, saya mau konfirmasi lagi yang disampaikan Pak Arief.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Kalau tadi Pak Ketua juga menyinggung masalah monopoli untuk pangan rakyat kita itu, pemerintah hadir untuk monopoli. Saya ingin tanya Pak Arief, kira-kira kendala di regulasi mana sehingga CPB ini tidak memberi ruang untuk menyerap seluruhnya dari panen petani kita? Kalau tadi Pak Arief menyatakan 2 juta... berapa tadi Pak? 2,4 artinya itu hanya 30% dari seluruh potensi dari petani kita kan begitu. Karena potensi petani anggap 7 juta, dengan diserap 2 juta artinya 30 juta, ada... dengan 30% asumsi segitu. Artinya, ada 70% yang masih dikuasai juga oleh swasta Pak Ketua sehingga wajar kalau masa-masa begini. Nanti ujung-ujungnya lagi-lagi pemerintah tidak akan lagi bisa mengendalikan harga. Nah, maka pertanyaan saya di regulasi mana yang kemudian membuat Bulog tidak bisa bergerak untuk menyerap semuanya? Apakah masalah duitnya atau memang ada regulasi yang menghalangi untuk itu? Saya pikir ini penting Pak, karena nanti akan terulang lagi karena alasan CBP nya 2 koma sekian sementara potensi panen kita sekitar 7 juta. Akhirnya, 30% kan yang diserap, artinya 70% diserap swasta sehingga begitu ada kepanikan ya namanya juga punya barang, kalau bisa untung gede kenapa harus untung kecil. Mungkin itu dan negara kan nggak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Kalau memang urusannya harus dibeli untuk menstabilkan pangan ke depan, harusnya begitu. Kalau kata Pak Ono, Presidennya harus tanggung jawab begitu tadi katanya.

Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Dilanjut Pak Ketua, ini waktu habis ini Pak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Terakhir ya Pak...

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya ingin tanya ke Pak Arief atau Bulog. Dengan impor beras yang dilakukan selama ini, apakah Bulog untung? Bisa dijawab Pak, apakah untung atau tidak?

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Dalam setiap penugasan Bulog mendatkan *fee* Rp50,00 per kg.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Per kg, berarti untung ya.

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Tidak ya..., upah Rp50,00 per kg dari misalnya harga beras yang dijual oleh Bulog 14.000.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Baik. Yang kedua, pertanyaan saya ke Bulog, apakah beras impor itu yang diimpor Bulog itu bisa dijual ke swasta?

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

SPHP misalnya itu dijual ke retail. Retail termasuk swasta di dalamnya kategorinya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Dalam jumlah yang banyak boleh ya?

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Ya, karena memang retail pedagang-pedagang di pasar dan sekitarnya memang swasta kan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya, kalau SPHP itu tidak mengubah karung ya masih bisa menjual dengan harga standar Bulog. Tapi, kalau sudah skala besar, kemudian diambil oleh swasta diganti karungnya bisa menjadi yang awalnya harganya 12.000 sudah bisa dia jual dengan harga 14.000, itu juga bahayanya.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Begini Pak Suhardi Duka, SPHP itu di dalam kemasan 5 kg di situ ada tulisannya ya 50 ribu 4 ratus ya? 54.000. Sedangkan pedagang itu belinya 9.950 ya kalau nggak salah ya, gitu.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Tapi kan ini Pak, di Bulog harga beras itu ini kan gelondongan datang. Nanti di Bulog baru dibuat kemasan.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Ya betul, dibuat kemasan

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya itu kan tidak berkemas SPHP ke luar, bisa saja dibuat gelondongan ke luar yang 50 kg per karung itu. Itu yang perlu diawasi Pak..., Pak Ka Bulog.

Yang selanjutnya saya ingin sampaikan juga, bahwa sesungguhnya kekhawatiran kita terhadap petani untuk tahun 2024 saya nggak terlalu khawatir. Apakah Bulog beli berasnya petani atau tidak saya nggak khawatir. Bahkan, petani lebih suka kalau pasar itu di pasar saja yang penting tentu saja masalahnya jangan terlalu banyak impor melebihi..., melebihi kemampuan pasar. Karena saya melihat bahwa tingkat produksi dalam negeri tidak mencukupi, Pak Ketua, untuk tahun 2024. Dengan demikian harga beras tidak akan turun..., tidak akan merugikan petani tahun 2024 ini. Jadi, Pak Slamet tadi kekhawatirannya kenapa Bulog tidak mengambil sampai sekian persen dari pasar, tidak usah terlalu khawatir karena produksi petani tidak cukup.

Dengan demikian itu yang pandangan saya Pak. Makasih.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T):

Pak Ketua, sedikit terakhir Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Ya 1 menit.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T):

Pertanyaan untuk Pak Dirut Bulog. Saya sudah mengerjakan dengan Pak Arief ya Pak Bapanas ini, Kepala Bapanas, yang datang waktu itu Pak Sarwo di Indramayu terkait dengan jenis padi kebo ya. Nah, sekarang kan biasanya kebo ini ditanam di MT I. Dari 1,8 juta ton gabah kering petani, 1,2 nya ini itu jenis kebo Pak. Secara resmi waktu itu Bulog tidak mau menerima, tapi non resminya sebenarnya diserap juga. Nah, sekarang sudah ada kebijakan belum dari Bulog untuk menerima jenis kebo tersebut?

DIRUT PERUM BULOG (BAYU KRISNAMUKTI):

Saat ini Bulog memiliki beberapa fasilitas yang sudah dibangun, sehingga dengan demikian memungkinkan juga untuk membeli beras maupun gabah dalam kualitas yang mungkin sebenarnya tidak memenuhi standar dan

ketentuan. Jadi, konsekuensinya nanti hanya di biaya dan di harga. Tapi, dengan fasilitas itu kami sudah minta kepada teman-teman untuk bisa diserap. Demikian juga ada kemungkinan juga ada kemungkinan yang lain Bapak, beras itu atau gabah itu diserap dulu oleh penggilingan kecil dan kemudian Bulog membeli beras pecah kulit dari penggilingan dan itu langkah yang lain. Dengan demikian, itu yang saya kira mungkin Pak Ketua paling paham kita punya 170.000 jenis penggilingan yang kapasitas terpasangnya 2,5x gabah yang tersedia. Jadi, ini juga masalah tersendiri yang yang harus kita pikirkan secara keseluruhan.

Terima kasih.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T):

Ya, jadi begini Pak. Kalau yang sudah berjalan itu kan yang tadi disampaikan Pak Bayu ini ya tapi non resmi. Jadi, Bulog itu mendapatkan atau menyerap dalam bentuk beras dari penggilingan kecil tapi dioplos ya kan dengan Ciherang, dengan IR. Dan, karena mengoplos, karena tidak resmi ya main anulah harga, ya kan karena harus lobi ke sana-ke sini. Tapi, kalau kepala gudangnya baik diterima, kalau tidak baik tidak lolos. Nah, ini Pak Sarwo hapal betul kan yang kemarin dikeluhkan para penggilingan kecil tadi. Nah, kalau tadi jawaban Pak Bayu kan belum secara tegas itu Pak. Harusnya, ya mohon dengan segera secara tegasnya jenis kebo itu bisa. Karena kalau dari segi rasa jauh lah dengan apa tadi beras Pak Arief? Beras apa itu Pak Sudin itu? Pakistan. Jauh Pak, lebih enak, pulen Pak. Semua merasakan *itu*. Pak Sarwo juga merasakan berasnya waktu itu enak. Tapi, kenapa? Karena ada apa namanya ada apinya, tidak tahan lama. *Nah*, tinggal *treatmentnya* saja kan dari Bulog.

Mohon ini menjadi perhatian. Terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Cukup ya. Tadi diskusinya cukup seru, karena kalau kita tidak diskusi gini kan tidak akan terbuka dan kita tidak akan mendapatkan wacana pengetahuan yang lebih. Bulog tidak akan mampu menyerap gabah petani maupun beras apabila HPP nya tidak diubah. Betul nggak Pak Arief?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Izin Ketua. Justru ini kita mau sampaikan bahwa Badan Pangan sudah menyiapkan, sudah membuat ya regulasi bahwa Bulog itu bisa menyerap komersial. Jadi, 5.000 itu adalah CBP, ya 5.000 untuk 9.950 itu adalah CBP. Tapi, Bulog juga diperkenankan untuk menyerap komersial. Jadi, kayak kemarin gabah harga 7.000, itu Bulog juga serap karena punya MPRP Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Tetapi, kan ada batasannya untuk komersial.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Nggak Ketua, jadi di regulasi itu ya disiapkan juga pada saat pemerintah memerlukan CBP itu bisa di-convert dari beras komersial yang diserap bisa di-convert ke CBP.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Saya paham Pak, maksudnya kan tinggal subsidi begitu kan.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Iya Ketua

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Subsidinya kalau beda 4.000-5.000 bagaimana? Berapa Triliun pemerintah harus mengeluarkan uang kalau nggak di-split.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Ya Ketua, minimal bahwa Bulog itu bisa melakukan serapan komersial. Untuk yang nanti 5.000 atau kita naikkan, kita akan duduk setelah kondisi normal Ketua. Karena kalau sekarang diputuskan harga GKP, harga beras, ini sekarang kondisi belum normal. Jadi, izin kita tunggu waktunya pas, kita tunggu *stakeholder* semua kita siapkan. Tadi sempat ditayangkan juga kan Ketua menghitung sampai harga 2.700 sampai 4.000, berapa margin. Tinggal berapa margin yang petani paling baik ya di situ sebenarnya. Hitungan-hitungannya kan ada ya Ketua, begitu.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Ini pertanyaan saya terakhir. Kan jagung mahal waktu itu, kenapa *wheat* itu masuk Indonesia masih dipersulit? *Wheat*.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Izinnya di Kementerian Pertanian, Bapak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Oooh begitu ya.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Semua rekomendasi impor, Rekim itu ada di kementerian teknis. Jadi, untuk *wheat*, jagung, beras, daging sapi, kerbau itu ada di kementerian teknis. Setelah itu, prosesnya ada di Kementerian Perdagangan untuk PI nya.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Sorry, saya mau tanya, nanti kalau membedakan *wheat food and feed* bagaimana caranya? Nggak, saya, saya mau tahu saja begitu. Saya kan nggak, nggak ngerti makanya saya tanya. Ya sudah nggak usah jawab lah. Saya tahu *you* nggak bakal berani jawab ya.

Kesimpulan silahkan. Jadi, dari diskusi tanggapan, masukan, segera kita adakan kesimpulan rapat pada sore ini. Semoga hasil diskusi menjadi pelajaran untuk kita semua. Silakan.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Kesimpulan/Keputusan:

1. Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional agar dalam menugaskan Perum Bulog dan ID Food melakukan penyerapan pangan di antaranya gabah/beras dan jagung mengutamakan pengadaan dalam negeri guna menjaga harga di tingkat petani yang akan digunakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Anggota?

SELURUH ANGGOTA:

Setuju.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Setuju.

Pemerintah?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Setuju.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan Harga Pokok Penjualan/HPP beras setelah melalui hasil kajian yang komprehensif.

Anggota?

DIR. SUPPLY CHAIN & PELAYANAN PUBLIK (MOKHAMAD SURYAMTO):

Izin Pak, bukan “Harga Pokok Penjualan” tapi “Harga Pembelian Pemerintah” Pak.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Oke, “Harga Pembelian Pemerintah” tapi tetap HPP.

Oke, para Anggota? Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog agar mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh pasar tradisional serta tidak menjadikan pasar induk sebagai barometer stok dan harga.

Anggota?

Pemerintah?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Tidak.

Izin Pak Budi.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Ya.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Bukan pasar induk tidak ya. Pasar induk menjadi salah satu barometer.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Oke.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Tidak menjadi satu-satunya ya.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Dikoreksi “tidak menjadi satu-satunya”. “Tidak menjadikan pasar induk sebagai satu-satunya”, begitu.

Saya ulang,

3. Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog agar mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh pasar tradisional serta tidak menjadikan pasar induk sebagai satu-satunya barometer stok dan harga.

Anggota?

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI mendorong agar Badan Pangan Nasional memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyelenggarakan Cadangan Kedelai Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Para Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

WK.KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PG/BUDHY SETIAWAN):

Pemerintah?

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Setuju dan sudah dilakukan Pak Budhy, tinggal kuantitinya saja kita tentukan berapa yang lebih tinggi.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Kalau masalah kuantiti, kan Anda tinggal penugasan ke Bulog. Jangan Anda tugaskan ke swasta lagi Bos ya.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Sebelum kita menutup rapat dengar pendapat hari ini, saya persilakan Saudara Kepala Badan untuk menyampaikan kata penutup.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI):

Terima kasih Ketua, Pimpinan, seluruh Anggota Komisi IV, Bapak-Ibu Direksi BUMN di bidang pangan, Bulog, dan RNI.

Hari ini kita betul-betul mendapatkan masukan yang konstruktif dan tetap kritis dari Teman-teman Komisi IV. Semoga ke depan lebih baik. Seperti yang disampaikan Ketua, pengadaan nomor satu memang pengadaan prioritas dalam negeri, ya kita berjanji untuk itu. Untuk pengadaan dari luar negeri itu biasanya hanya untuk ganjal stok kita yang ada.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA KOMISI IV DPR RI (F-PDIP/SUDIN,S.E):

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat sore ini.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV, mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilamin*, Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

ULFA NURFAJAR, S.E., M.B.A
NIP. 197401251993022001